

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 300 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cileunyi untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cileunyi untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CILEUNYI

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cileunyi untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cileunyi yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cileunyi yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cileunyi dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cileunyi dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cileunyi agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cileunyi;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cileunyi;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cileunyi.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CILEUNYI

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cileunyi dalam menyusun Renja Kecamatan Cileunyi.
(2) Renstra Kecamatan Cileunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.
b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cileunyi paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Cileunyi; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cileunyi.
c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Cileunyi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Cileunyi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cileunyi; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.
e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CILEUNYI

### Pasal 5

(1) Kecamatan Cileunyi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cileunyi dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cileunyi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cileunyi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cileunyi.
(3) Camat Cileunyi menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cileunyi.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V
## PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CILEUNYI

### Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cileunyi dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cileunyi mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cileunyi dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cileunyi, maka Renstra Kecamatan Cileunyi dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cileunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cileunyi terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cileunyi.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 300

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 300 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI
# KABUPATEN BANDUNG
# TAHUN 2025-2029

## BAB I
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang menjelaskan bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan RPJPD. Untuk periode 2025-2029, RPJMD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penyusunan rancangan awal merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, maka perlu menyusun Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1

tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat peran dan fungsi Dokumen Renstra sangat penting bagi Kecamatan Cileunyi dan Masyarakat, dalam Proses Pembangunan Daerah untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, serta dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan, maka penyusunan Renstra dilakukan secara integratif dan komprehensif yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Berdasarkan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis baik dari tugas, pokok dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target yang akan dicapai, yang mengacu kepada sasaran RPJMD Kabupaten Bandung. Serta memperhatikan perubahan atau penyesuaian Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang menjadi Acuan dalam Penetapan Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja pada Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029, dan melihat Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang sudah dapat mencapai Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana berdasarkan hasil capaian Kinerja pada Periode Renstra sebelumnya ada beberapa target kinerja yang sudah dapat melampaui target akhir perode renstra yang berdasarkan rekomendasi mitra kerja di sarankan agar dapat disesuaikan dengan Capaian Kinerja pada tahun berkenaan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pelaksanaan Program Prioritas Kabupaten Bandung pada Tahun yang akan datang baik penambahan program,kegiatan dan sub kegiatan maupun penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cileunyi sebagai

penjabaran dokumen tahunannya. Adapun Misi Bupati yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cileunyi yaitu Misi ke-3 "Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Gambar 1.1 *Mapping* Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja




Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/ Kep.769-Tapem / 2023 tentang Perubahan Atas Pelimpahan Sebagian Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/ Kep.615-KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Cileunyi, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

### 1.3.1 Maksud

Dokumen Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Menyesuaikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung;
2. Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama sesuai Capaian Target Akhir Renstra Periode sebelumnya;
3. Menfasilitasi Program Kegiatan yang belum terakomodir pada Dokumen Renstra Sebelumnya
4. Menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cileunyi;
5. Untuk Menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Cileunyi dalam jangka menengah;
6. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Cileunyi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Renstra antara lain adalah:

1. Memberikan pedoman dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan kabupaten Bandung
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,efisien dan berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Cileunyi.

5. Menjadi dasar peningkatan urusan yang mengikat pada kecamatan dalam urusan Kewilayahan dimana dalam urusanya kecamatan lebih menitik beratkan pada urusan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan pada Publik yang merupakan salah satu bentuk kinerja kecamatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Goverment*)

## 1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta menyajikan dasar hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan, diikuti dengan penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan dokumen ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis memuat penjelasan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Cileunyi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan. Pada bagian Permasalahan dan Isu Strategis dijelaskan pula hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, serta penentuan isu-isu strategis yang relevan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan memuat uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cileunyi yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan, serta strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan terukur.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cileunyi, lengkap dengan indikator, target kinerja, serta pagu indikatif. Bab ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra dalam mendukung RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi simpulan atas keseluruhan isi dokumen Renstra dan penegasan komitmen Kecamatan Cileunyi dalam melaksanakan perencanaan strategis secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CILEUNYI

## 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cileunyi

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

#### 2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cileunyi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya
2. Penyelenggaraan pengendalian, koordinasi, integrasi, singkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas fungsinya yang di tunjang dengan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya dan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat.

4. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh UPT dan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya..
5. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 disebutkan bahwa Camat membawahkan jabatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.
2. Seksi Pemerintahan,
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
4. Seksi Pembangunan.
5. Seksi Sosial Budaya.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai Fungsi:

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

4. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
6. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 disebutkan bahwa Sekretaris Kecamatan membawahkan jabatan sebagai berikut:

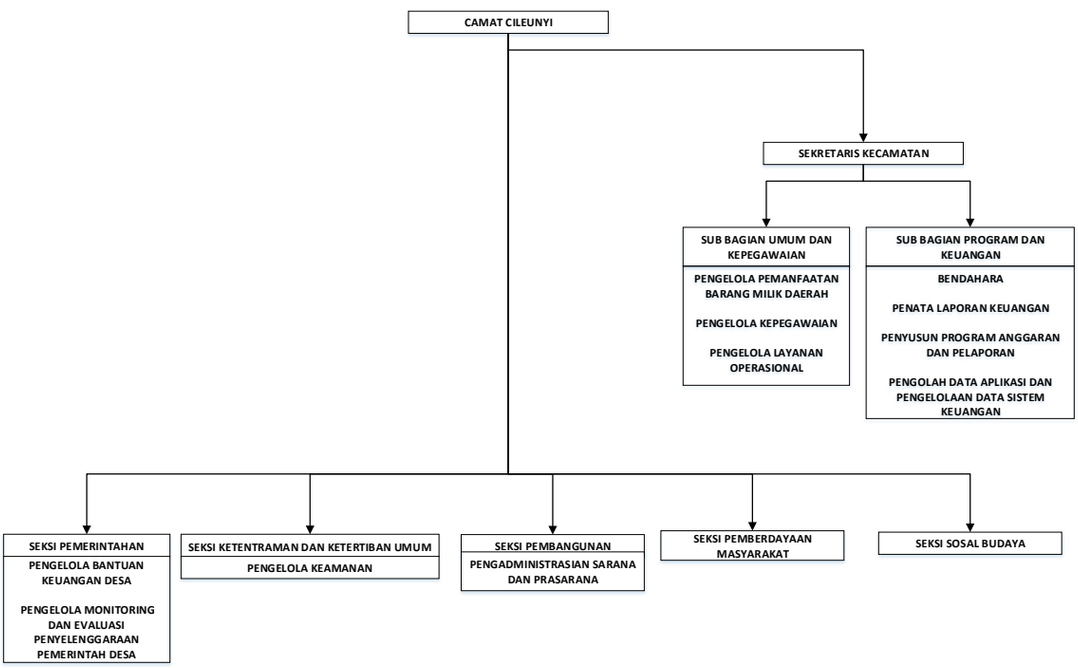
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Cileunyi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cileunyi

Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung




Sumber Data : Data Kepegawaian 2025 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam rangka mendukungnya terwujudnya Akuntabilitas Kinerja setiap Aparatur Kecamatan serta menefektikan tugas dan fungsi pada setiap jabatan yang ada di kecamatan maka disusunnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan penjabaran Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan Cileunyi Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran Kinerja Pegawai pada Kecamatan Cileunyi

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| CAMAT | Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan | 1.Perumusan, pengaturan, pengkooridinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kententraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya<br>2.Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya<br>3.Penyelengaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya<br>4.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan |
| SEKRETARIS KECAMATAN | Merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan | 1.Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;<br>2.Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;<br>3.Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;<br>4.Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;<br>5.Penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);<br>6.Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>7.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat. | 1.Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Keuangan Perangat Daerah yang Akuntabel<br>2.Meningkatnya Kondisi Layanan Internal dan Capaian Kinerja Aparatur dalam mewujudkan Akuntabilitas Perangkat Daerah<br>3.Peningkatan Kualitas Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintahan Daerah<br>4.Meningkatnya kualitas tim Pembina Desa dalam Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | Menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan | 1.Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;<br>2. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;<br>3. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;<br>4. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;<br>5. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;<br>6. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;<br>7. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan<br>8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan. | 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan Nomenklatur<br>2.Tersusunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai tepat waktu sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang Berlaku<br>3. Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang menyajikan analisis informasi memadai sesuai Nomenklatur |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai | 1.Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;<br>2. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;<br>3. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;<br>4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;<br>5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; | 1. Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditentukan<br>2.Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah selesai tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditentukan<br>3. Tersusunya Laporan pengelolaan dan pemeliharaan aset / BMD yang lengkap dan *up to date* |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| | serta administrasi kepegawaian lainnya. | 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan<br>7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. | |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan | 1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;<br>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;<br>3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan. | 1. Terselengaranya Fasilitasi administrasi pemerintahan, kelembagaan serta keuangan dan aset Desa sesuai ketentuan yang berlaku<br>2. Fasilitasi pelayanan pemerintahan umum terlayani secara tepat waktu |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;<br>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;<br>3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. | 1.Terselengaranya Pembinaan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai target kinerja dan waktu yang ditetapkan<br>2. Fasilitasi Dokumen,Laporan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan yang berlaku |
| KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA | Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya | 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;<br>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;<br>3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya. | 1. Fasilitasi Urusan bidang sosial, pendidikan, budaya, keagamanan, kepemudaan dan ketahanan nasional terlayani sesuai waktu yang ditetapkan<br>2. Fasilitasi Pembinaan, pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan yang berlaku |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN | Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. | 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;<br>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;<br>3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan. | 1. Fasilitasi Koordinasi pengendalian sarana dan prasarana umum terlaksana sesuai prosedur<br>2.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. | 1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;<br>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;<br>3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan<br>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Kewilayahan terfasilitasi sesuai peraturan perundang- undangan<br>2.Fasilitasi layanan administrasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | |
| PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan program anggaran dan pelaporan | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan program anggaran dan pelaporan | 1. Draft perencanaan kinerja dan penganggaran di susun sesuai waktu yang ditentukan<br>2. Laporan capaian kinerja perangkat daerah diselesaikan sesuai prosedur dan tepat waktu |
| BENDAHARA PENGELUARAN | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan | 1. Inventarisasi penyediaan keuangan perangkat daerah disusun secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku<br>2. Administrasi keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditentukan |
| PENATA LAPORAN KEUANGAN | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penata laporan keuangan | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penata laporan keuangan | 1. Draft perencanaan kinerja dan penganggaran di susun sesuai waktu yang ditentukan<br>2. Laporan capaian kinerja perangkat |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| | | | daerah diselesaikan sesuai prosedur dan tepat waktu |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 1.Tata Kelola Sistem Informasi Perencanaan dilaksanakan sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan<br>2.Tersedianya Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Keuangan secara berkala<br>3.Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Kecamatan Sesuai dengan prosedur yang berlaku |
| PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan, dan pengelolaan data; | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan, dan pengelolaan data; | 1.Pengelolaan data pada aplikasi dilaksanakan sesuai prosedur dan format yang ditetapkan<br>2. Tersedianya data laporan kinerja dan administrasi keuangan sesuai format yang ditentukan |
| PENGELOLA KEPEGAWAIAN | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah; | 1. Tersedianya data/berkas kepegawaian serta penunjang administrasi yang lengkap dan *up to date*<br>2.Data Kepegawaian yang mutakhir dan up to date secara periodik |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| | pemanfaatan barang milik daerah; | | |
| PENGELOLA PEMANFAATAN BMD | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah; | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah; | 1.Tersusunnya Laporan barang milik daerah selesai tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditentukan<br>2. Terkendalinya pengelolaan asset BMD perangkat daerah |
| PENGADMINISTRASI UMUM | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; | 1.Pengadministrasian Surat Menyurat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur yang berlaku<br>2.Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian lainnya terlaksana sesuai dengan ketentuan |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum | Terlaksananya Fasilitasi Teknis Layanan Umum sesuai Prosedur yang berlaku |
| PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa | Fasilitasi, koordinasi pengelolaan pelaporan administrasi bantuan keuangan desa dan Peraturan Desa sesuai prosedur yang ditetapkan |
| PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa | Fasilitasi, koordinasi, konsultasi laporan keuangan dan aset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |

| JABATAN | TUGAS POKOK | FUNGSI | SASARAN KINERJA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi kependudukan; | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi kependudukan; | Terlaksananya Fasilitasi Teknis Layanan Administrasi Kependudukan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku |
| PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | Melakukan kegatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat di bidang pengelola keamanan dan ketertiban | Melakukan kegatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat di bidang pengelola keamanan dan ketertiban | 1.Pengelolaan, Pengumpulan Data serta Penyusunan laporan Keamanan dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara tepat waktu<br>2.Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang ditetapkan |

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya perangkat daerah merupakan aspek kewilayahan yang menggambarkan akan potensi Perangkat Daerah dimana aspek aspek nya dapat menunjang akan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Kecamatan Cileunyi.

2.2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Cileunyi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 29 orang pegawai, terdiri dari 21 orang (PNS), 1 orang (CPNS), 2 orang (PPPK) dan 5 orang pegawai tidak tetap. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya penambahan pegawai, peningkatan kapasitas SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap Target Capaian. Keadaan personil Kecamatan Cileunyi per Tanggal Agustus 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

| No | Pendidikan | Status Kepegawaian | | | | | | | | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | CPNS | | PPPK | | THL | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | SD | | | | | | | | | 0 | 0% |
| 2 | SMP | | | | | | | | | 0 | 0% |
| 3 | SMA | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 4 | 14% |
| 4 | D3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 3 | 10% |
| 5 | S1 | 7 | 3 | 1 | | | | | 2 | 13 | 45% |
| 6 | S2 | 8 | | | | | | 1 | | 9 | 31% |
| Jumlah | | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 100% |

Sumber Data : Data Kepegawaian 2025 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

Tabel 2.2 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD

sebesar 0 %, SMP sebesar 0 % SMA sebesar 14 %, D3 sebesar 10 %, S1 Sebesar 45 % dan S2 sebesar 31 %. Kecamatan Cileunyi sebagai perangkat daerah, secara pendidikan formal sudah cukup memadai, dilihat dari prosentase status pendidikan setara S1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2025

| No | Golongan | Status Kepegawaian | | | | | | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | CPNS | | PPPK | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | Gol I | | | | | | | 0 | 0% |
| 2 | Gol II | 2 | | | | | | 2 | 8% |
| 3 | Gol III | 10 | 6 | 1 | | | | 17 | 71% |
| 4 | Gol IV | 3 | | | | | | 3 | 13% |
| 5 | VII | | | | | 1 | 1 | 2 | 8% |
| Jumlah | | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 100% |

Sumber Data : Data Kepegawaian 2025 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

Berdasarkan Tabel 2.3. diatas maka pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, Golongan II sebanyak 8 %, Golongan III sebanyak 71 % dan Golongan IV sebanyak 13 %, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Cileunyi didominasi oleh golongan III, dilain sisi Kecamatan Cileunyi memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk tenaga pelaksana administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Cileunyi juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2025

| No. | Esselon | Jumlah Pegawai | | Tingkat Diklatpim | Jumlah Pegawai yang mengikuti | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | | L | P | |
| 1 | III a | 1 | | III | 1 | | 100% |

| No. | Esselon | Jumlah Pegawai | | Tingkat Diklatpim | Jumlah Pegawai yang mengikuti | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | | L | P | |
| 2 | III b | 1 | | III | 1 | | 100% |
| 3 | IV a | 4 | 1 | IV | 3 | | 60% |
| 4 | IV b | | 2 | IV | | 2 | 100% |
| | Jumlah | 4 | 5 | | 3 | 4 | 78% |

Sumber Data : Data Kepegawaian 2025 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

Berdasarkan Tabel 2.4. diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang telah mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Esselon sebanyak 78%, sedangkan 22 % belum mengikuti kegiatan tersebut karena baru menduduki jabatan struktural dan tidak terdata sebelumnya.

2.2.2.2 Sumber Daya Aset Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukanya akan ketersediaan saranan dan prasaranan yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewajibanya sebagai peneyelenggara pelayanan publik.

Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam penetapan laporan penggunaan Barang Milik Daerah pada satuan perangkat daerah

Tabel 2.5

HASIL REKONSILIASI ASET PERIODE TAHUN 2024

KECAMATAN CILEUNYI

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024 | AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024 | NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 8,520,414,000.00 | - | 8,520,414,000.00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1,610,495,365.00 | 1,431,303,874.00 | 179,191,491.00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2,377,939,109.00 | 495,873,221.00 | 1,882,065,888.00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024 | AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024 | NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - |
| | Total Aset Tetap | 12,510,848,474.00 | 1,927,177,095.00 | 10,583,671,379.00 |
| 7 | Aset Tak Berwujud | - | - | - |
| 8 | Aset Lain-Lain/Rusak Berat | 57,215,650.00 | 54,014,192 | 3,201,458.00 |
| 9 | Aset yang dimanfaatkan pihak lain | - | - | - |
| | Total Aset Lainnya | 57,215,650.00 | 54,014,192 | 3,201,458.00 |
| Total Aset Tetap + Aset Lainnya | | 12,568,064,124.00 | 1,981,191,287.00 | 10,586,872,837.00 |

Sumber Data : Laporan BMD Triwulan IV Tahun 2024 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

Tabel 2.6

DAFTAR ASSET KECAMATAN CILEUNYI

TAHUN 2024

| No | Kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 2 Unit | Layak Pakai |
| 2 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 12 Unit | Layak Pakai |
| 3 | 02.02.01.09.001 | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain | 1 Unit | Layak Pakai |
| 4 | 02.04.01.04.005 | Lemari Penyimpan | 5 Unit | Layak Pakai |
| 5 | 02.05.01.01.002 | Mesin ketik manual standard (14 – 16 Inci) | 1 Unit | Layak Pakai |
| 6 | 02.05.01.04.002 | Lemari Kayu | 8 Unit | Layak Pakai |
| 7 | 02.05.01.04.004 | Rak Kayu | 1 Unit | Layak Pakai |
| 8 | 02.05.01.04.005 | Filling Cabinet Besi | 5 Unit | Layak Pakai |
| 9 | 02.05.01.05.002 | CCTV | 1 Unit | Layak Pakai |

| No | Kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 10 | 02.05.01.05.003 | Papan Visual/ Papan nama | 2 Unit | Layak Pakai |
| 11 | 02.05.01.05.009 | Peta | 1 Unit | Layak Pakai |
| 12 | 02.05.01.05.010 | Alat penghancur kertas | 1 Unit | Layak Pakai |
| 13 | 02.05.01.05.12 | Mesin Absensi | 3 Unit | Layak Pakai |
| 14 | 02.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi | 1 Unit | Layak Pakai |
| 15 | 02.05.01.05.077 | Papan Pengumuman | 1 Unit | Layak Pakai |
| 16 | 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya | 5 Unit | Layak Pakai |
| 17 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 5 Unit | Layak Pakai |
| 18 | 02.05.02.01.003 | Kursi Besi/Metal | 4 Unit | Layak Pakai |
| 19 | 02.05.02.01.005 | Sice | 1 Unit | Layak Pakai |
| 20 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat | 2 Unit | Layak Pakai |
| 21 | 02.05.02.01.012 | Meja Telepon | 1 Unit | Layak Pakai |
| 22 | 02.05.02.01.024 | Meja ½ Biro | 2 Unit | Layak Pakai |
| 23 | 02.05.02.01.027 | Meja Makan Besi | 1 Unit | Layak Pakai |
| 24 | 02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | 50 Unit | Layak Pakai |
| 25 | 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu | 3 Unit | Layak Pakai |
| 26 | 02.05.02.01.032 | Kursi Putar | 30 Unit | Layak Pakai |
| 27 | 02.05.02.01.036 | Kursi Lipat | 50 Unit | Layak Pakai |
| 28 | 02.05.02.01.039 | Meja Komputer | 3 Unit | Layak Pakai |
| 29 | 02.05.02.01.048 | Sofa | 3 Unit | Layak Pakai |
| 30 | 02.05.02.03.003 | Mesin Pemotong Rumput | 1 Unit | Layak Pakai |
| 31 | 02.05.02.04.001 | Lemari Es | 1 Unit | Layak Pakai |
| 32 | 02.05.02.04.003 | A.C. Window | 2 Unit | Layak Pakai |
| 33 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split | 1 Unit | Layak Pakai |
| 34 | 02.05.02.04.006 | Kipas Angin | 4 Unit | Layak Pakai |
| 35 | 02.05.02.06.001 | Radio | 1 Unit | Layak Pakai |
| 36 | 02.05.02.06.002 | Televisi | 5 Unit | Layak Pakai |
| 37 | 02.05.02.06.008 | Sound System | 4 Unit | Layak Pakai |
| 38 | 02.05.02.06.023 | Tustel | 3 Unit | Layak Pakai |
| 39 | 02.05.02.06.038 | Dispenser | 3 Unit | Layak Pakai |
| 40 | 02.05.02.06.008 | Sound System | 4 Unit | Layak Pakai |
| 41 | 02.05.02.06.012 | Wireless | 1 Unit | Layak Pakai |
| 42 | 02.05.02.06.021 | Camera Video | 1 Unit | Layak Pakai |

| No | Kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 43 | 02.05.02.06.039 | Mimbar/ Podium | 1 Unit | Layak Pakai |
| 44 | 02.05.02.06.059 | Gordyn/Kray | 1 Unit | Layak Pakai |
| 45 | 02.05.02.06.077 | Alat Rumah Tangga Lain - lain | 5 Unit | Layak Pakai |
| 46 | 02.05.03.01.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 5 Unit | Layak Pakai |
| 47 | 02.05.03.02.011 | Meja Tamu Biasa | 1 Unit | Layak Pakai |
| 48 | 02.05.03.03.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 Unit | Layak Pakai |
| 49 | 02.05.03.03.007 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 Unit | Layak Pakai |
| 50 | 02.06.01.02.105 | Projector | 3 Unit | Layak Pakai |
| 51 | 02.06.02.01.001 | Telephone(PABX) | 1 Unit | Layak Pakai |
| 52 | 02.06.02.01.004 | Telephone Mobile | 1 Unit | Layak Pakai |
| 53 | 02.06.02.01.006 | Handy Talky | 9 Unit | Layak Pakai |
| 54 | 02.06.02.01.010 | Facsimile | 2 Unit | Layak Pakai |
| 55 | 02.06.03.47.002 | Genset | 1 Unit | Layak Pakai |
| 56 | 02.07.01.01.169 | Alat Kedokteran umum lainnya | 2 Unit | Layak Pakai |
| 57 | 02.08.01.12.024 | Stabilizer | 3 Unit | Layak Pakai |
| 58 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 15 Unit | Layak Pakai |
| 59 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 16 Unit | Layak Pakai |
| 60 | 02.10.01.02.003 | Note Book | 3 Unit | Layak Pakai |
| 61 | 02.10.01.03.003 | Printer(Peralatan Personal Komputer) | 21 Unit | Layak Pakai |

Sumber Data : Laporan BMD Triwulan IV Tahun 2024 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cileunyi

2.1.3 Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Kecamatan Cileunyi

2.1.3.1 Data-data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cileunyi

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya

mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/ Kep.769-Tapem / 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. meliputi bidang-bidang :

a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
d. Bidang Sosial
e. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
f. Bidang Pertanahan
g. Bidang Lingkungan Hidup
h. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
j. Bidang Komunikasi dan informatika
k. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah
l. Bidang Penanaman Modal
m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
n. Bidang Kebudayaan
o. Bidang Pariwisata
p. Bidang Pertanian

Seluruh kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi, pelaksanaannya selama tahun 2025-2029 perlu dievaluasi pencapaian sasarannya, pengevaluasian keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara program kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus di jalankan, disamping harus mempasilitasi tugas dari perangkat daerah juga harus mempasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang di kelola. Adapun Kondisi dan Potensi Wilayah Kecamatan Cileunyi dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan penyusunan strategi Pembangunan daerah berdasarkan potensi lokal, sebagai berikut:

Luas wilayah wilayah administrasi seluar 2.835.146 Ha, meliputi 6 (enam) Desa, yaitu:

Tabel 2.7 Luas Wilayah Kecamatan Cileunyi

| NO | DESA | Luas Wilayah ( Ha ) | Persentase Terhadap Luas Kecamatan ( % ) |
|---|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 767,057 | 27 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 325,011 | 11 |
| 3 | CIMEKAR | 471,705 | 17 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 489,174 | 17 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 311,853 | 11 |
| 6 | CINUNUK | 480,925 | 17 |
| | JUMLAH | 2.835.146 | 100 |

Sumber Data : Laporan Penduduk Bulan Agustus Tahun 2025 Seksi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Cileunyi

| NO | DESA | Jumlah RW | Jumlah RT | Penduduk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | P | L + P |
| 1 | CILEUNYI WETAN | 23 | 121 | 16.705 | 15.990 | 32.695 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 19 | 85 | 9.765 | 9.624 | 19.389 |
| 3 | CIMEKAR | 32 | 175 | 20.540 | 19.754 | 40.294 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 26 | 116 | 12.503 | 11.665 | 24.168 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 17 | 86 | 7.735 | 7.612 | 15.347 |
| 6 | CINUNUK | 29 | 195 | 25.354 | 25.099 | 50.453 |
| JUMLAH | | | | 92.602 | 89.744 | 182.346 |

Sumber Data : Laporan Penduduk Bulan Agustus Tahun 2025 Seksi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi

Secara Administrasi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Cileunyi




Sumber Data : Profil Kecamatan Cileunyi, 2025

Berdasarkan Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Cileunyi yang menjadi salah satu penghubung antara beberapa Kabupaten/ Kota pada Jawa Barat mempunyai potensi strategis, dalam menciptakan objek usaha yang dapat mendukung perekonomian masyarakat diwilayah kecamatan, serta mendukung Objek Wisata/ Pariwisata yang ada pada tiap desa diwilayah kecamatan. Adapun Jumlah Objek Wisata dan Usaha sebagai berikut :

Tabel 2.9 Jumlah Objek Wisata dan Usaha

| No | Desa | Hotel/ Penginapan | Objek Wisata/ Pariwisata | Tempat Makan | Tempat Usaha Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 2 | 2 | 5 | 28 |
| 3 | CIMEKAR | 0 | 1 | 11 | 57 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 2 | 3 | 6 | 44 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 6 | CINUNUK | 0 | 7 | 17 | 123 |
| Total | | 4 | 14 | 50 | 311 |

Sumber : Laporan Jumlah Objek Wisata dan Usaha Seksi Pembangunan dan Seksi Sosial dan Budaya Kecamatan Cileunyi Bulan Agustus 2025

Jumlah Hotel/ Penginapan terdapat 4 Unit, Hanya terdapat di Desa Cibiru Wetan 2 dan Cileunyi Kulon 2. Dimana letak desa tersebut berada pada jalur akses utama ke Kota Bandung dan pintu tol, sehingga wajar bila akomodasi berkembang di lokasi yang strategis untuk mobilitas. Untuk Jumlah Objek Wisata terdapat 14 Lokasi terdiri dari Desa Cinunuk 7 memiliki jumlah terbanyak, didukung kondisi geografis berupa wilayah perbukitan, area hijau, dan jalur menuju wisata alam di Bandung Timur dan Sumedang. Cileunyi Kulon 3 dan Cibiru Wetan 2 juga memiliki potensi wisata karena lokasinya di jalur lintasan utama. Cileunyi Wetan 0 tidak memiliki wisata, karena lebih berfungsi sebagai permukiman padat dan kawasan ekonomi perkotaan. Desa lain, seperti Cinunuk dan Cimekar, meskipun ramai, tidak memiliki hotel karena kawasan lebih banyak dimanfaatkan untuk perdagangan, kuliner, dan hunian. Sedangkan Jumlah Tempat Makan/ Kuliner terdapat 50 Lokasi yang tersebar pada beberapa lokasi desa seperti Desa Cinunuk 17 dan Cimekar 11 mempunyai peta sebaran terbanyak karena lokasi tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak serta dekat dengan kampus, perumahan, dan jalan raya, sehingga sektor kuliner berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat lokal maupun pendatang. Sedangka Desa Cileunyi Wetan 4 paling sedikit karena kawasan ini lebih padat oleh perumahan dan akses transportasi, bukan pusat kuliner. Dan untuk Jumlah Tempat Usaha lainya peta sebaran pada Desa Cinunuk 123 menjadi pusat usaha terbesar, karena: Terletak di jalur utama Bandung,dekat gerbang tol, dan memiliki kepadatan penduduk tinggi. Desa Cimekar 57 juga cukup berkembang karena berada di wilayah padat perumahan dan dekat fasilitas pendidikan. Sebaliknya, Cibiru Hilir 15 memiliki usaha paling sedikit, karena geografisnya lebih ke arah pinggiran perbukitan dan permukiman pedesaan, bukan jalur utama perdagangan.

Berdasarkan Keunikan yang ada pada tiap desa diwilayah Kecamatan Cileunyi menghasilkan beberapa ciri khas produk barang/ pangan yang menjadikan potensi UMKM yang meningkatkan nilai keunikan pada wilayah Kecamatan Cileunyi dengan wilayah kecamatan yang lain, sebagai berikut :

Tabel 2.10 Jumlah UMKM

| No | Desa | Jumlah UMKM |
|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 1437 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 1071 |
| 3 | CIMEKAR | 1721 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 960 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 629 |
| 6 | CINUNUK | 1892 |
| Total | | 7710 |

Sumber : Laporan Jumlah UMKM Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cileunyi Bulan Agustus 2025

Berdasarkan Data Peta Sebaran UMKM pada Kecamatan Cileunyi, dapat dilihat bahwa UMKM menjadikan tulang punggung ekonomi pada Kecamatan Cileunyi dengan konsentrasi terbesar di Cinunuk dan Cimekar, Potensi paling menonjol adalah perdagangan, kuliner, dan usaha rumah tangga. Desa perbukitan pada Cibiru Hilir & Cibiru Wetan memiliki peluang mengembangkan UMKM berbasis pertanian, wisata alam, dan produk khas desa. Maka Perlu strategi pemerataan dan dukungan berupa akses modal, pelatihan digital, serta promosi produk lokal agar UMKM di seluruh desa bisa tumbuh seimbang.

Kecamatan Cileunyi sebagai kepanjangan tangan Pemerintahan Daerah di wilayah mempunyai tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi pada bidang pendidikan, Adapun ketersebaran Sekolah Formal dan Non

Formal pada Kecamatan Cileunyi sebagi berikut :

Tabel 2.11

Jumlah Sekolah/ Lembaga Pendidikan Lainnya

| No | Desa | Lembaga Paud | SD/MIs atau yang setara | SMP/MTs atau yang setara | SMA/MA atau yang setara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 24 | 16 | 3 | 2 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 16 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | CIMEKAR | 31 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 21 | 12 | 5 | 2 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | CINUNUK | 45 | 15 | 2 | 5 |
| Total | | 148 | 66 | 17 | 16 |

Sumber : Laporan Jumlah Sekolah/ Lembaga Pendidikan Lainnya Seksi Sosial dan Budaya Kecamatan Cileunyi Bulan Agustus 2025

Jumlah PAUD di Kecamatan Cileunyi sangat banyak, yaitu 148 lembaga. Desa Cinunuk 45 dan Cimekar 31 menjadi desa dengan PAUD terbanyak. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah padat penduduk, khususnya Cinunuk yang merupakan wilayah perkotaan berkembang dan dekat akses ke Kota Bandung, Sementara desa dengan PAUD paling sedikit adalah Cibiru Hilir 11, yang kemungkinan dipengaruhi kondisi geografis dan jumlah penduduk lebih sedikit. Terdapat 66 SD/MI di seluruh kecamatan Cileunyi. Cileunyi Wetan 16 sekolah memiliki jumlah terbanyak, diikuti Cinunuk 15 sekolah. Distribusi SD/MI relatif merata, namun desa seperti Cibiru Wetan 5 sekolah dan Cimekar 8 sekolah menunjukkan keterbatasan fasilitas jika dibandingkan dengan jumlah PAUD di wilayah tersebut. Jumlah SMP/MTs relatif sedikit, hanya 17 sekolah di seluruh kecamatan Desa Cimekar dan Cileunyi Kulon menonjol dengan masing-masing 5 SMP/MTs, sementara desa lain hanya memiliki 1–3 sekolah. Hal ini dapat menimbulkan potensi penumpukan siswa dari desa lain yang melanjutkan ke SMP di dua desa tersebut. Jumlah SMA/MA di Kecamatan Cileunyi ada 16 sekolah, dengan konsentrasi terbesar di Cinunuk 5 sekolah dan Cimekar 4 sekolah. Beberapa desa lain hanya memiliki 1–2 SMA/MA, sehingga sebagian siswa kemungkinan besar memilih melanjutkan ke SMA/SMK di luar wilayah Cileunyi (misalnya ke Kota Bandung atau Kabupaten Sumedang). Maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi Geografis sangat berdampak pada ketersediaan lembaga pendidikan formal dan nonformal, sebagai berikut Desa Cinunuk, Cileunyi Wetan, dan Cileunyi Kulon merupakan wilayah

strategis karena dekat dengan akses jalan tol Cileunyi dan pusat keramaian. Tidak heran jika lembaga pendidikan di wilayah ini lebih banyak dan bervariasi, Desa Cibiru Wetan dan Cibiru Hilir memiliki jumlah sekolah lebih sedikit. Hal ini bisa dipengaruhi kondisi geografis berupa wilayah perbukitan dan jarak dari pusat keramaian, sehingga pembangunan sekolah tidak seintensif desa lain, Sedangkan Desa Cimekar mempunyai jumlah SMP dan SMA relatif tinggi, menunjukkan peran desa ini sebagai pusat pendidikan menengah. Kecamatan Cileunyi memiliki pemerataan pendidikan dasar (SD/MI) yang cukup baik, tetapi jenjang SMP dan SMA masih terbatas dan cenderung terpusat di beberapa desa saja. Cinunuk dan Cimekar berfungsi sebagai pusat pendidikan menengah ke atas, sementara desa lain lebih banyak menyumbang lembaga PAUD dan SD. Perlu adanya strategi pengembangan sekolah menengah di desa dengan fasilitas minim (Cibiru Wetan & Cibiru Hilir) agar akses pendidikan lebih merata.

Tabel 2.12 Jumlah Pelayanan Kesehatan

| No | Desa | Jumlah Pelayanan Kesehatan |
|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 15 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 8 |
| 3 | CIMEKAR | 18 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 16 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 5 |
| 6 | CINUNUK | 30 |
| Total | | 92 |

Sumber : Laporan Jumlah Pelayanan Kesehatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cileunyi Bulan Agustus 2025

Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kecamatan Cileunyi terdapat 92 Pelayanan Kesehatan yang tersebar pada beberapa lokasi, dimana untuk Desa Cinunuk Jumlah pelayanan kesehatan terbanyak, sebanyak 30 dikarenakan desa tersebut merupakan terpadat di Cileunyi, berada di jalur utama Bandung–Cileunyi. Banyaknya fasilitas kesehatan selaras dengan tingginya kebutuhan layanan masyarakat di daerah padat penduduk. Desa Cimekar mempunyai jumlah 18 pelayanan kesehatan, dengan Fasilitas kesehatan cukup banyak, didukung posisi geografis yang dekat dengan kawasan pendidikan dan perumahan.Menjadikan pusat layanan sekunder selain Cinunuk. Desa Cileunyi Kulon terdapat 16 pelayanan kesehatan, jumlah tersebut cukup tinggi mendukung wilayah yang strategis dekat jalur tol dan akses transportasi.Kemungkinan menjadi

tempat rujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar gerbang tol. Desa Cileunyi Wetan mempunyai 15 pelayanan Kesehatan, jumlah tersebut relatif baik, meski wilayah lebih padat oleh perumahan. Menjadi salah satu penopang layanan kesehatan di sisi barat Cileunyi. Desa Cibiru Wetan mempunyai 8 pelayanan Kesehatan, dimana jumlah tersebut masih terbatas, dikarenakan kondisi geografis berupa perbukitan dan jarak dari pusat ekonomi membuat fasilitas kesehatan tidak sebanyak desa lain. Sedankan Desa Cibiru Hilir hanya memiliki 5 pelayanan Kesehatan, jumlah paling sedikit diantara desa-desa yang lain karena Desa tersebut merupakan daerah pinggiran kota dengan kepadatan penduduk rendah. Hal ini bisa menimbulkan keterbatasan akses layanan kesehatan bagi warga, sehingga kemungkinan besar masyarakat bergantung pada desa tetangga (Cinunuk atau Cileunyi Kulon).

Berdasarkan Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Cileunyi yang menjadi salah satu penghubung antara beberapa Kabupaten/ Kota pada Jawa Barat mempunyai potensi strategis, dalam menyediakan tempat yang strategis dalam pembangunan hunian yang strategis sebanyak 104 perumahan, yang tersebar pada beberapa lokasi desa, sebagai berikut :

Tabel 2.13 Jumlah Perumahan

| No | Desa | Jumlah Perumahan |
|---|---|---|
| 1 | CILEUNYI WETAN | 17 |
| 2 | CIBIRU WETAN | 5 |
| 3 | CIMEKAR | 21 |
| 4 | CILEUNYI KULON | 26 |
| 5 | CIBIRU HILIR | 6 |
| 6 | CINUNUK | 29 |
| Total | | 104 |

Sumber : Laporan Jumlah Perumahan Seksi Pembangunan Kecamatan Cileunyi Bulan Agustus 2025

Adapun peta sebaran terbanyak berada pada Desa Cinunuk sebanyak 29 perumahan, menjadikan desa dengan perumahan terbanyak karena Cinunuk berada di jalur utama Bandung–Cileunyi, dekat dengan gerbang tol, pusat usaha, serta banyak fasilitas Pendidikan, sangat cocok sebagai kawasan hunian padat yang menopang pertumbuhan penduduk urban. Desa Cileunyi Kulon terdapat 26 perumahan karena berada di jalur strategis pintu keluar Tol Cileunyi, dan banyak berkembang perumahan skala besar karena aksesibilitas tinggi ke Kota Bandung dan Sumedang. Desa Cimekar

memiliki 21 perumahan, dimana jumlah tersebut cukup tinggi karena wilayah ini dekat dengan kawasan pendidikan (kampus) dan perumahan urban baru, yang menjadikan lokasi favorit bagi keluarga pekerja atau mahasiswa yang beraktivitas di Bandung Timur. Desa Cileunyi Wetan mempunyai 17 perumahan, yang menjadikan desa dengan jumlah perumahan katagori menengah, berfungsi sebagai area permukiman penunjang dengan akses jalan yang relatif mudah ke pusat kecamatan. Desa Cibiru Hilir mempunyai 6 perumahan dengan Jumlah kecil karena wilayah lebih berupa area perbukitan dan pedesaan,tidak menjadi pusat urbanisasi besar, sehingga pembangunan perumahan lebih terbatas. Sedangkan untuk Desa Cibiru Wetan memiliki jumlah perumahan paling sedikit, karena kondisi geografis yang relatif perbukitan dan jauh dari jalur utama membuat pengembang kurang tertarik membangun perumahan skala besar di wilayah ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi ini memperlihatkan urbanisasi di Cileunyi sangat terkonsentrasi di wilayah yang dekat jalur tol dan jalan utama, sementara wilayah perbukitan berkembang lebih lambat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu evaluasi yang komprehensif terhadap capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat direalisasikan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tersebut.

Periode tahun 2021–2024 merupakan masa yang penuh dinamika, baik dari sisi perubahan regulasi, tantangan pembangunan, maupun kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, evaluasi capaian IKU dan IKK tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan serta strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Penyajian hasil evaluasi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian yang telah diperoleh, tingkat efektivitas pelaksanaan program, serta relevansinya terhadap visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam perbaikan kinerja, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi

penggunaan sumber daya pada periode selanjutnya.

Adapun Hasil Capaian IKU dan IKK pada Kecamatan Cileunyi pada Periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Capaian IKU dan IKK (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Tabel 2.14 Capaian Capaian IKU – IKK (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2022-2024

| Indikator Kinerja | TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| IKM | 84,98 | 86,00 | 84,82 | 86,75 | 82,91 | 86,00 | 86,33 |

Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Gambar 2.3 Capaian IKU – IKK (Indeks Kepuasan Masyarakat)




Tahun 2022-2024

Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Capaian Nilai IKM pada beberapa tahun terakhir dapat terlihat adanya penurunan signifikan dari Tahun 2022 sebesar 84,82 dari target 86,00, Tahun 2023 sebesar 82,91 dari Target 86,75. Dikarenakan pada beberapa tahun terakhir adanya beberapa perubahan kebijakan seperti adanya Perubahan Nomenkaltur Pelimpahan Kewenangan Bupati pada Keputusan Bupati Bandung Nomor : 137.1/Kep.467 – Tapem/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat yang mempengaruhi survey kepuasan masyarakat

pada kecamatan bergantung dengan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat serta dalam proses survey kepuasan masyarakat yang sudah berbasis online melalui barcode. Dimana hal tersebut implimentasi reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik tapi tidak sebanding dengan Kondisi Masyarakat Kecamatan Cileunyi yang Heterogen serta berbagai Kalangan yang harus dilyanani serta Kapasitas Pemohonan/Responden tidak semua sudah faham terkait penguna Teknologi Informasi/ Pengunanaan Aplikasi berbasis online sehingga masih adanya survey kepuasan masyarakat yang belum terlaporkan yang berujungnya pada tidak tercapainya target kinerja dan penuruan kinerja pada beberapa tahun terakhir, tetapi jika membandingkan dengan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat terlihat adanya peningkatan, perbaikan ataupun Solusi alternatif dalam menangani berbagai kendala dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seperti dalam menyesuaikan jumlah layanan yang ada, adanya tambahan petugas pelayanan, dan memperdayakan mahasiswa yang sedang melaksanakan magang diperbantukan di staf pelayanan, serta dapat membantu masyarakat mendapatkan produk administrasi yang diinginkannya sesuai dengan persyaratan yang ada dan juga membantu pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat baik melalui sistem ataupun melalui kuisoner yang nanti akan diinputkan oleh petugas kepada Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM).

2. Capaian IKU dan IKK (Persentase Desa Beradministrasi Baik dan Jumlah Desa Cepat Berkembang)

Tabel 2.15 Capaian IKU – IKK (Persentase Desa Beradministrasi Baik dan Jumlah Desa Cepat Berkembang) Tahun 2022-2024

| Indikator Kinerja | TAHUN | | | | | Indikator Kinerja | TAHUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | |
| | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | Target | Realisasi |
| Persentase Desa Beradministrasi Baik | N/A | 100,00% | 91,00% | 100,00% | 96,00% | Jumlah Desa Cepat Berkembang | 1 | 1 |

Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Gambar 2.4 Capaian IKU – IKK (Persentase Desa Beradministrasi Baik dan Jumlah Desa Cepat Berkembang) Tahun 2022-2024







Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Persentase Desa Beradministrasi Baik pada Tahun sebelumnya sebesar 91 % dari 100 %, sedangkan untuk Tahun 2023 Capaian Kinerja Persentase Desa Beradministrasi Baik yaitu 96 % dari 100 %, Jika dilihat perbandingan tahun lalu dan tahun 2023 terlihat adanya peningkatan capaian kinerja dimana hal tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dalam Pembinaan Desa terkait ketertiban Administrasi Desa dengan Memfasilitasi, Koordinasi, Asistensi Desa terhadap ketersedian Administrasi Desa berdasarkan Nomenklatur Permendagari 47 Tahun 2026 Tentang Administrasi Desa. Tahun 2023 adalah tahun kedua periode Renstra 2021 - 2026, Realisasi Persentase Desa Beradministrasi Baik, hal tersebut merupakan hasil pembinaan desa oleh Tim Monev Kecamatan terhapap ketertiban administrasi desa berdasarakan permendagri No.47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa, dengan Persentase sebesar 96% dari 100%. Sedangkan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Kecamatan adalah 100.00 %, Jika dibandingkan dengan Target Akhir Periode Renstra masih sekitar beberapa Dokumen/Administrasi Desa pada beberapa Desa di Kecamatan Cileunyi yang belum terpenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Buku Tanah di Desa
4. Buku Penduduk Sementara

hal tersebut menjadi acuan serta tindak lanjut Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan terhadap Pembinaan Desa untuk tahun yang akan datang. Tetapi Berdasarkan Koordinasi, Konsultasi serta Asistensi dengan Mitra Kerja dan Tim SAKIP Kabupaten bahwa Indikator Kinerja tersebut tidak dapat digunakan lagi pada Tahun berikutnya karena berdasarkan Evaluasi Tim SAKIP serta Rekomendasi Mitra Kerja Bidang Perencanaan, Indikator Kinerja tersebut belum memenuhi standar yang baik dalam mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *SMART* ( *Spesific* (Tujuan Jelas dan Fokus, *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Sesuai), *Time Based* (Target harus ada ketentuan waktu)), adapun untuk indikator kinerja untuk Tahun 2024 sampai 2026 akan mengunakan Indikator Kinerja Jumlah Desa Cepat Berkembang dengan Definisi Operasional (DO) bersumber pada Nomeklatur Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, meskipun Indikator Kinerja tersebut tidak akan dipergunakan kembali tetapi hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi Tim Monitoring Pembina Desa. Pada Evaluasi Kinerja IKU dan IKK pada Tahun 2024 yang merupakan masa transisi perubahan indikator kinerja untuk mengambarkan Kualitas Pemerintahan Desa pada Kecamatan Cileunyi dapat terlihat dengan kondisi tata pemerintahan desa yang dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Cepat Berkembang pada Tahun 2024 sebanyak 1 (Satu) Desa dari Target 1 (Satu Desa) dengan Lokasi Utama Penilaian ialah Desa Cileunyi Wetan. Adapun Jumlah Desa Cepat Berkembang didapatkan dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa oleh Tim Monev Kecamatan melalui Aplikasi Epdeskel, dengan menghibau pemerintahan desa agar dapat melengkapi bahan data penilaian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai November 2024. Dengan Adanya Komponen baru dalam hal Pembinaan Desa oleh Tim Pembina Desa pada Tingkat Kecamatan, Desa dapat menilai diri sendiri terhadap perkembangan pada wilayah desanya pada Tahun 2024 di Desa Cileunyi Wetan selain pencapaian Nilai Evdeskel yang sudah masuk katagori cepat berkembang, desa tersebut juga dalam pelaksanaan musyawarah rencana Pembangunan kompetitif pada Tahun 2024 masuk menjadi 10 Besar, dimana hal tersebut mengambarkan Tingkat perkembangan antara desa yang lainya.

3. Capaian IKU - IKK (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tabel 2.16 Capaian IKU – IKK (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022-2024

| Indikator Kinerja | TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Nilai AKIP | 67,14 | 68,00 | 74,01 | 69,52 | 74,00 | 74,50 | 79,80 |

Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Gambar 2.5 Capaian IKU – IKK (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022-2024




Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec.Cileunyi pada Tahun 2023 dan 2022, tidak adanya penurunan maupun peningkatan tetapi jika dilihat Capaian pada Poin Penilaian ada beberapa Penilaian yang mengalami peningkatan dan penurunan, poin penilaian yang mengalami penurunan yaitu Pelaporan Kinerja adanya penurunan sebesar 0.75 dimana kualitas pelaporan informasi belum menyajikan data dan informasi yang memadai bagi penguna, sedangkan penilaian yang mengalami peningkatan kinerja dapat dilihat pada poin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adanya peningkatan capaian sebesar 0.75 dimana Evaluasi Internal dan Rekomendasi SAKIP telah dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti pada

seluruh unit kerja pada Kecamatan Cileunyi serta adanya Dukungan Teknologi Informasi dalam hal Pelaporan Kinerja melalui Aplikasi Sidalmonep,adapun Rekomendasi pada poin penilian tersebut agar pelaksanaaan tindak lanjut SAKIP agar segera ditindaklanjuti, Maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Nilai AKIP Kecamatan Tahun 2023 dapat dipertahankan berdasarkan Target Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut merupakan Komitmen kinerja aparatur internal dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam tercapainya Kinerja Perangkat Daerah serta tidak terlepas Koodinasi serta Kerjasama antara instansi internal dan mitra kerja dalam tercapainya Kinerja Perangkat Daerah. Capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan pada Tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 79.80 dari target sebesar 74.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107.11 %. Jika dibandingkan dengan target capaian periode terakhir pada Dokumen Perubahan Perencanaan Strategis Target pada Tahun 2026 sebesar 75,00, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada periode ketiga pada periode sudah dapat melampaui target pada periode terakhir dokumen perencanaan strategis, dimana hal tersebut menjadi bahan penyesuain target pada tahun berikutnya dikarenakan pencapaian kinerja pada tahun 2024 sudah dapat melampaui target periode akhir renstra, hal tersebut disebabkan adanya penigkatan kinerja aparatur pada bidang perencaan, penganggaran serapa pelaporan melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan rapat koordinasi internal maupun eksternal.

4. Capaian IKU dan IKK (Persentase BMD dalam Kondisi Baik)

Tabel 2.17 Capaian IKU – IKK (Persentase BMD dalam Kondisi Baik)
Tahun 2022-2024

| Indikator Kinerja | TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 85,00% | 87,00% | 85,00% | 87,15% | 87,00% | 87,00% | 84,50% |

Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Gambar 2.6 Capaian IKU – IKK (Persentase BMD dalam Kondisi Baik) Tahun 2022-2024




Sumber Data : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cileunyi, Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cileunyi

Dilihat dari Grafik diatas perbandingan antara realisasi kinerja, capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu jelas ada peningkatan kondisi asset dalam kondisi baik/ dikelola dengan baik, dari administrasi maupun kondisi asset barang/ benda. Realisasi Tahun 2022 dengan prosentase 85.00% dari target 87.00%. Sedangkan prosentase pada Tahun 2023 sebesar 87.00 % dari target 87.15%. Maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Persentase BMD dalam Kondisi Baik Mengalami Peningkatan yang Signifikan dengan Tahun lalu tetapi jika dibandingkan dengan Target pada Tahun ini Capaian Kinerja belum dapat mencapai Target yang telah ditentukan, dimana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sudah banyak peralatan kantor baik mebeleur seperti kursi, meja yang sudah tidak layak pakai serta peralatan kantor elektronik seperti laptop, printer yang sudah kondisi Rusak Berat, Tetapi pada Tahun 2023 Kecamatan Cileunyi telah menambah sarana dan prasarana pendukung kantor berupa Gedung Arsip Kecamatan dalam Pemenuhan SOP Kerarsipan Dinas. Sedangkan prosentase pada Tahun 2024 sebesar 84.50 % dari target 87.00%. Maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Persentase BMD dalam Kondisi Baik Mengalami Penurunan yang Signifikan dengan Tahun lalu tetapi jika dibandingkan dengan Target pada Tahun ini Capaian Kinerja belum dapat mencapai Target yang telah ditentukan, dimana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sudah banyak peralatan kantor baik mebeleur seperti kursi, meja yang sudah tidak layak pakai serta peralatan

kantor elektronik seperti laptop, printer yang sudah kondisi Rusak Berat, Tetapi pada Tahun 2024 Kecamatan Cileunyi telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cileunyi Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cileunyi Tahun 2021–2026, evaluasi capaian kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti tingkat pencapaian indikator kinerja, tetapi juga mengkaji efektivitas pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat.

Kecamatan Cileunyi sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, penyajian hasil evaluasi capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama periode 2021–2024, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dalam rangka pencapaian target Renstra hingga tahun 2026.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi peningkatan kinerja, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cileunyi ke depan.

Untuk Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Tahun 2021 – 2024 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 68 | 69,52 | 70,52 | 71,52 | 73 | 74,01 | 74 | 79,8 | 0 | 0 | 108,84% | 106,44% | 113,16% | 0,00% | 0,00% |
| | | Persentase BMD Dalam Kondisi Baik | 87 | 87,15 | 87,30 | 88 | 88,15 | 85 | 87 | 84,5 | 0 | 0 | 97,70% | 99,83% | 96,79% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tepat waktu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 18 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 25 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 4 | 4 | | | 0 | 4 | 4 | | | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 35 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 87 | 87,15 | 87,30 | 88 | 88,15 | 85 | 87 | 84,5 | 0 | 0 | 97,70% | 99,83% | 96,79% | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 | | | | | 1 | | 0 | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 39 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 40 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 | 86,75 | 87,15 | 87,82 | 88 | 84,82 | 82,12 | 86,33 | 0 | 0 | 98,63% | 94,66% | 99,06% | 0,00% | 0,00% |
| 43 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 44 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | | Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 46 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 47 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 48 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 49 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % | 100,00 % |
| 52 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 53 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 54 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 55 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 56 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 57 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 58 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 59 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | | Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 61 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dibina dan diawasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 62 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | persentase desa yang dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 63 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 64 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 65 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 66 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 67 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 68 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 69 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 70 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 71 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 72 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 73 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 74 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % | 100,00 % |
| 75 | Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 76 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00 % | 100,00 % |
| 77 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 78 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 79 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang difasilitasi | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| No | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| | Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 81 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Sumber : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Cileunyi 2022-2024

Dilihat dari Tabel 2.18 target kinerja pada indikator sasaran Kecamatan Cileunyi Tahun 2022-2026 secara umum dapat mencapai target kinerja pada tahun berkenan, namun ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti adanya perubahan nomenklatur, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta tidak seimbangnya pelaksanaan kegiatan dengan kondisi sumber daya manusia yang ada. Dalam dokumen Perencanaan Tahun lalu ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang diturunkan pada Indikator Program, dikarenakan pada Tahun tersebut belum memetakan beberapa Indikator Kinerja, dimana dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun sebelumnya mengalami fluktuasi Capaian Kinerja pada beberapa Program yang mengunakan Indikator Kinerja Utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Nilai Akip dan Persentase BMD dalam Kondisi Baik, Dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun lalu Nilai Akip mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan beberapa Rekomendasi/ Tindak lanjut Perbaikan Akuntabilitas Kinerja dipenuhi sesuai dengan ketentuan, serta adanya peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan/ bimbingan teknis terkait Akuntabilitas Kinerja, sedangkan untuk capaian Persentase BMD dalam Kondisi Baik pada tiap tahun mengalami fluktuasi kenaikan/ penurunan yang diakibatkan oleh penurunan nilai barang yang setiap tahunya mengalami penyusutan berdasarkan kondisi barang. Selain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, ada salah satu Program yang mengunakan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Dimana untuk capaian pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 – 2023 diamana hal tersebut dikarenakan survey kepuasan pada kecamatan bergantung dengan jumlah layanan yang diberikan kepada Masyarakat , hal tersebut merupakan dampak dari beberapa perubahan kebijakan salah satunya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 137.1/Kep.467 – Tapem/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :137.1/Kep.615-KSOTDA/2019

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat pada Bidang Penataan Ruang dihapuskan kewenangan kecamatan berupa Penerbitan IMB/PBG untuk perumahan serta Pemberian rekomendasi administrasi penebitan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk bangunan baru di atas 250m². Adapun pada tahun 2022 berpengaruh dampak transisi pemulihan Covid - Meskipun Capaian Kinerja IKM tidak dapat memenuhi target tetapi pelaksanaan pelayanan baik Administrasi Kependudukan maupun Non Kependudukan terlayanani dengan baik dan tepat waktu. Selain Capaian pada Program tersebut untuk beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Konsisten mencapai 100% pada setiap Tahun Evaluasi hal tersebut menandakan target yang ditetapkan relatif mudah dicapai/ mudah mendapatkan *outcome/ output* indikator kinerja

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 4.708.834.000 | 5.751.578.662 | 5.472.001.500 | 5.432.016.976 | 5.432.016.976 | 4.890.077.572,00 | 4.772.401.796,00 | 4.932.451.109,00 | 0,00 | 0,00 | 103,85% | 82,98% | 90,14% | 0,00% | 0,00% | 22,14% | -2,41% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.252.000 | 70.827.000 | 20.827.000 | 20.827.000 | 20.827.000 | 61.911.300,00 | 45.688.000,00 | 14.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321,58% | 64,51% | 67,59% | 0,00% | 0,00% | 267,89% | -26,20% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.252.000 | 13.252.000 | 3.252.000 | 3.252.000 | 3.252.000 | 3.251.800,00 | 6.526.000,00 | 3.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 49,25% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 307,50% | 100,69% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.250.000 | 23.743.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 46.909.900,00 | 16.300.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1103,76% | 68,65% | 88,24% | 0,00% | 0,00% | 458,66% | -65,25% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.500.000 | 13.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 2.499.800,00 | 10.684.800,00 | 1.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 80,19% | 50,38% | 0,00% | 0,00% | 433,00% | 327,43% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.750.000 | 7.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000,00 | 3.420.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 44,13% | 48,00% | 0,00% | 0,00% | 106,67% | -8,80% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.500.000 | 6.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.499.800,00 | 3.420.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 54,72% | 18,46% | 0,00% | 0,00% | 150,00% | 36,81% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 3.000.000 | 6.507.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 5.337.200,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 82,02% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 116,90% | 77,91% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.221.276.000 | 4.984.595.662 | 4.928.013.500 | 4.952.238.976 | 4.952.238.976 | 4.167.583.958,00 | 4.078.962.245,00 | 4.312.047.580,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% | 81,83% | 87,50% | 0,00% | 0,00% | 18,08% | -2,13% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.214.276.000 | 4.975.025.662 | 4.918.443.500 | 4.942.668.976 | 4.942.668.976 | 4.133.584.058,00 | 4.069.392.445,00 | 4.310.097.580,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% | 81,80% | 87,63% | 0,00% | 0,00% | 18,05% | -1,55% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000 | 3.345.000 | 3.345.000 | 3.345.000 | 3.345.000 | 2.000.000,00 | 3.345.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 4,48% | 0,00% | 0,00% | 67,25% | 67,25% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.000.000 | 4.225.000 | 4.225.000 | 4.225.000 | 4.225.000 | 30.000.000,00 | 4.224.800,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00% | 100,00% | 31,95% | 0,00% | 0,00% | 40,83% | -85,92% |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.999.900,00 | 2.000.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 22,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.750.000 | 9.325.000 | 3.525.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000,00 | 2.700.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 28,95% | 74,47% | 0,00% | 0,00% | 239,09% | -1,82% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.750.000 | 9.325.000 | 3.525.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000,00 | 2.700.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 28,95% | 74,47% | 0,00% | 0,00% | 239,09% | -1,82% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 2.250.000 | - | - | - | - | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.804.000 | 10.804.000 | 10.804.000 | 9.804.000 | 9.804.000 | 2.803.900,00 | 10.803.700,00 | 18.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 168,22% | 0,00% | 0,00% | 285,31% | 285,31% |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2.804.000 | 2.804.000 | 2.804.000 | 2.804.000 | 2.804.000 | 2.803.900,00 | 2.804.000,00 | 2.803.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 7.999.700,00 | 15.370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 192,13% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.393.000 | 133.388.000 | 134.978.000 | 153.292.000 | 152.592.000 | 152.504.444,00 | 155.665.600,00 | 135.500.300,00 | 0,00 | 0,00 | 170,60% | 116,70% | 100,39% | 0,00% | 0,00% | 49,22% | 2,07% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.992.744,00 | 2.991.700,00 | 2.995.900,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | 99,72% | 99,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 59.985.000 | 38.099.000 | 37.399.000 | 78.384.900,00 | 50.045.200,00 | 74.910.800,00 | 0,00 | 0,00 | 313,54% | 200,18% | 124,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -36,15% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.223.000 | 7.223.000 | 7.223.000 | 10.223.000 | 10.223.000 | 7.223.000,00 | 7.217.200,00 | 7.222.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 99,92% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 8.961.300,00 | 9.806.500,00 | 13.281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,01% | 87,56% | 118,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,43% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | 3.525.000 | - | - | - | - | 3.525.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36.730.000 | 77.200.000 | 47.330.000 | 84.530.000 | 84.530.000 | 48.702.500,00 | 75.840.000,00 | 30.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,60% | 98,24% | 65,18% | 0,00% | 0,00% | 110,18% | 55,72% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 64.557.000 | 226.099.000 | 15.000.000 | - | - | - | 199.749.250,00 | 14.963.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 88,35% | 99,76% | 0,00% | 0,00% | 250,23% | 0,00% |
| Pengadaan Mebel | - | 20.000.000 | 15.000.000 | - | - | - | 19.860.000,00 | 14.963.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 99,30% | 99,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.557.000 | 25.349.000 | - | - | - | - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -60,73% | 0,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana | - | 180.750.000 | - | - | - | | 179.889.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 99,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 226.320.000 | 243.620.000 | 286.820.000 | 243.660.000 | 244.160.000 | 244.292.209,00 | 259.022.297,00 | 267.856.660,00 | 0,00 | 0,00 | 107,94% | 106,32% | 93,39% | 0,00% | 0,00% | 7,64% | 6,03% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 47.300.000 | 46.500.000 | 46.500.000 | 47.000.000 | 17.099.425,00 | 30.987.497,00 | 26.796.020,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00% | 65,51% | 57,63% | 0,00% | 0,00% | 57,67% | 81,22% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 196.320.000 | 196.320.000 | 240.320.000 | 197.160.000 | 197.160.000 | 227.192.784,00 | 228.034.800,00 | 241.060.640,00 | 0,00 | 0,00 | 115,73% | 116,15% | 100,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.232.000 | 72.920.000 | 72.034.000 | 49.445.000 | 49.645.000 | 258.231.761,00 | 19.810.704,00 | 167.206.669,00 | 0,00 | 0,00 | 321,86% | 27,17% | 232,12% | 0,00% | 0,00% | -9,11% | -92,33% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14.312.000 | 16.750.000 | 17.614.000 | 18.000.000 | 18.200.000 | 8.004.254,00 | 16.140.704,00 | 13.830.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93% | 96,36% | 78,52% | 0,00% | 0,00% | 17,03% | 101,65% |
| Pemeliharaan Mebel | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000,00 | | - | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.675.000 | 3.675.000 | 3.675.000 | 5.675.000 | 5.675.000 | 6.650.000,00 | 3.670.000,00 | 3.672.100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | 99,86% | 99,92% | 0,00% | 0,00% | -44,94% | -44,81% |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 57.245.000 | 52.495.000 | 50.745.000 | 25.770.000 | 25.770.000 | 241.577.507,00 | - | 149.704.369,00 | 0,00 | 0,00 | 422,01% | 0,00% | 295,01% | 0,00% | 0,00% | -8,30% | -100,00% |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 53.379.000 | 112.557.336 | 244.074.200 | 103.363.000 | 107.888.000 | 154.793.400,00 | 160.696.736,00 | 351.362.720,00 | 0,00 | 0,00 | 289,99% | 142,77% | 143,96% | 0,00% | 0,00% | 110,86% | 3,81% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 3.654.000,00 | 4.172.600,00 | 4.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% | 99,02% | 98,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,19% |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 4.214.000 | 3.654.000,00 | 4.172.600,00 | 4.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% | 99,02% | 98,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,19% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 49.165.000 | 88.343.336 | 223.288.200 | 85.475.000 | 90.000.000 | 137.239.400,00 | 140.648.136,00 | 330.647.720,00 | 0,00 | 0,00 | 279,14% | 159,21% | 148,08% | 0,00% | 0,00% | 79,69% | 2,48% |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 49.165.000 | 88.343.336 | 223.288.200 | 85.475.000 | 90.000.000 | 137.239.400,00 | 140.648.136,00 | 330.647.720,00 | 0,00 | 0,00 | 279,14% | 159,21% | 148,08% | 0,00% | 0,00% | 79,69% | 2,48% |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | - | 20.000.000 | 16.572.000 | 13.674.000 | 13.674.000 | 13.900.000,00 | 15.876.000,00 | 16.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 79,38% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,22% |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | - | 20.000.000 | 16.572.000 | 13.674.000 | 13.674.000 | 13.900.000,00 | 15.876.000,00 | 16.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 79,38% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,22% |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 35.187.000 | 63.187.000 | 162.049.200 | 58.187.000 | 58.187.000 | 32.880.000,00 | 46.361.000,00 | 85.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% | 73,37% | 53,03% | 0,00% | 0,00% | 79,57% | 41,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 22.425.000 | 50.425.000 | 66.969.000 | 45.425.000 | 45.425.000 | 20.220.000,00 | 33.732.000,00 | 53.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,17% | 66,90% | 80,22% | 0,00% | 0,00% | 124,86% | 66,82% |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15.000.000 | 43.175.000 | 54.729.000 | 30.425.000 | 30.425.000 | 14.980.000,00 | 33.732.000,00 | 41.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | 78,13% | 75,80% | 0,00% | 0,00% | 187,83% | 125,18% |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 7.425.000 | 7.250.000 | 12.240.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.240.000,00 | - | 12.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | -2,36% | -100,00% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12.762.000 | 12.762.000 | 95.080.200 | 12.762.000 | 12.762.000 | 12.660.000,00 | 12.629.000,00 | 32.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | 98,96% | 33,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,24% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12.762.000 | 12.762.000 | 95.080.200 | 12.762.000 | 12.762.000 | 12.660.000,00 | 12.629.000,00 | 32.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | 98,96% | 33,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,24% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 20.000.000 | 92.945.000 | 138.416.800 | 38.000.000 | 38.000.000 | 40.686.900,00 | 86.166.700,00 | 89.621.800,00 | 0,00 | 0,00 | 203,43% | 92,71% | 64,75% | 0,00% | 0,00% | 364,73% | 111,78% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 20.000.000 | 92.945.000 | 138.416.800 | 38.000.000 | 38.000.000 | 40.686.900,00 | 86.166.700,00 | 89.621.800,00 | 0,00 | 0,00 | 203,43% | 92,71% | 64,75% | 0,00% | 0,00% | 364,73% | 111,78% |
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 20.000.000 | - | - | - | - | 18.364.400,00 | - | | 0,00 | 0,00 | 91,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | - | 22.925.000 | 47.470.400 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 21.971.800,00 | 42.471.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 95,84% | 89,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | 27.265.000 | 35.974.400 | 10.000.000 | 10.000.000 | 22.322.500,00 | 23.907.900,00 | 29.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 87,69% | 81,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,10% |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | 42.755.000 | 54.972.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | - | 40.287.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 94,23% | 32,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 139.344.000 | 58.439.000 | 54.514.600 | 49.970.000 | 49.970.000 | 58.456.700,00 | 44.088.000,00 | 77.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,95% | 75,44% | 141,90% | 0,00% | 0,00% | -58,06% | -24,58% |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 139.344.000 | 58.439.000 | 54.514.600 | 49.970.000 | 49.970.000 | 58.456.700,00 | 44.088.000,00 | 77.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,95% | 75,44% | 141,90% | 0,00% | 0,00% | -58,06% | -24,58% |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.677.000 | - | - | - | - | 2.046.900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 76,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 14.843.000 | 15.464.000 | 6.995.000 | 4.995.000 | 4.843.000 | 14.784.900,00 | 3.969.000,00 | 6.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | 25,67% | 96,40% | 0,00% | 0,00% | 4,18% | -73,16% |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | 10.525.000 | 10.525.000 | 7.848.000 | 12.677.000 | - | 9.369.000,00 | 36.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 89,02% | 345,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | 4.677.000 | - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 12.430.000 | - | - | - | - | 10.374.900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 83,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 32.450.000 | 32.450.000 | 36.994.600 | 32.450.000 | 32.450.000 | 31.250.000,00 | 30.750.000,00 | 34.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30% | 94,76% | 92,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,60% |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 25.320.000 | - | - | - | - | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan | 51.624.000 | - | - | - | - | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | 72.439.000 | 117.016.000 | 50.480.000 | 50.480.000 | 61.913.177,00 | 50.332.200,00 | 136.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 69,48% | 116,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -18,71% |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | 9.475.000 | 33.172.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 7.775.000,00 | 79.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 82,06% | 239,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 9.475.000 | 33.172.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 7.775.000,00 | 79.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 82,06% | 239,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | 62.964.000 | 83.844.000 | 35.437.000 | 35.437.000 | 61.913.177,00 | 42.557.200,00 | 57.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 67,59% | 67,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -31,26% |
| Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan | - | - | - | - | - | 27.349.177,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | - | 38.269.000 | 59.958.000 | 25.857.000 | 25.857.000 | 34.564.000,00 | 28.932.400,00 | 47.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 75,60% | 79,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,29% |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | 18.475.000 | 14.343.000 | 7.580.000 | 7.580.000 | | 13.624.800,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 73,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - | 6.220.000 | 9.543.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 9.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | 5.043.000 | 5.043.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | - | - | - | 4.143.000 | 4.143.000 | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | - | - | - | 900.000 | 900.000 | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024 Kecamatan Cileunyi

Pada Tabel 2.19 menggambarkan tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cileunyi dimana secara gambaran umum memperlihatkan perjalanan penyelenggaraan anggaran pada target yang di capai, rasio penurunan yang signifikan dimana banyak program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Pada Tahun 2022 adanya perubahan beberapa nomenklatur yang mempengaruhi tugas dan fungsi kecamatan yang bermuara pada Pagu Anggaran pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan serta Anggaran Tahunan tidak sama, yang akibatnya pada Pelaporan Kinerja serta Realiasi Anggaran Tahunan pada beberapa sub kegiatan tidak singkron dengan data capaian kinerja dan realiasi anggaran Jangka Menengah tetapi secara Pelaksanaan Kegiatan telah terakomodir pada sub kegiatan yang berdasarkan nomenklatur yang berlaku, sebagai berikut :

1. Capaian Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Secara Tupoksi berdasarkan Nomenklatur yang lama Sub Kegiatan tersebut di ampu oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat tetapi jika mengacu pada Nomenklatur yang baru Sub Kegiatan tersebut diampu oleh Kasi Pemerintahan, Sedangkan Sub Kegiatan yang dapat diampu oleh Kasi Pemberdayaan ada 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan adapun hasil analisis kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan , Kecamatan Cileunyi mengunakan 2 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, serta untuk Kasi Pembangunan hanya dapat mengampu 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dan berdasarkan analisis kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan pada Kecamatan Cileunyi mengunakan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pelayanan, Jika dilihat pada Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahunan untuk Persentase Capaian Realiasasi Anggaran pada 3 (tiga) Sub Kegiatan tersebut mencapai 90% lebih, hal tersebut menunjukan komitmen Aparatur terhadap tercapainya Kinerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Bandung, pada kondisi yang Dinamis Jalanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

2. Capaian Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah tidak dapat terukur hal tersebut dikarenakan perubahan nomenklatur Keputusan Bupati Bandung Nomor : 137.1/Kep.467 – Tapem/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang mempengaruhi kewenangan camat terhadap memfasilitasi beberapa pelimpahan kewenangan Bupati yaitu pada Bidang Penataan Ruang dihapuskan kewenangan kecamatan dalam Penerbitan IMB/PBG untuk kawasan perumahan serta Pemberian rekomendasi administrasi penebitan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk bangunan baru di atas 250m², dimana anggaran pada sub kegiatan tersebut dialihkan pada program – program prioritas tahun 2022.

Jika melihat Data Capaian Realisasi Tahun Anggaran 2023 ada beberapa Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Persentase Realiasi Anggaran melebihi 100 % maupun kurang 90% hal tersebut tidak terlepas dengan kondisi yang sering berubah – ubah baik dari perubahan nomeklatur perencanaan, tugas dan fungsi perangkat daerah yang dapat menunjang program prioritas perangkat daerah dan pemerintahah daerah, serta pada Tahun tersebut ada beberapa Kebijakan yang mempengaruhi penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengan maupun Pendek Perangkat Daerah seperti halnya menklasifikasi sub kegiatan yang

dapat digunakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan serta Menyelaraskan Indikator Kegiatan pada Kecamatan sedangkan untuk indkator sub kegiatan sudah terfasilitasi pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Adapun dengan penyelarasan Data Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan serta Klasifikasi Sub Kegiatan yang dapat digunakan oleh Kecamatan hal tersebut memudahkan Perangkat Daerah dalam pengelolaan Tata Kelola Satu Data (TKSD) Tingkat Kabupaten Bandung, TKSD tersebut merupakan Amanat Nasional pada Tahun 2023 dan selanjutnya. Jika dilihat pada Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahunan pada Kecamatan Cileunyi Tingkat Persentase Serapan Anggaran Tahun 2023 sebesar 95.95 % (Berdasarkan Data Hasil Rekonsiliasi Bidang Akuntasi dan Pelaporan), hal tersebut merupakan Komitmen Aparatur pada Level Struktural serta Pelaksana pada Sub Bagian maupun Seksi pada Kecamatan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan KAK Tahun 2023.

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Cileunyi

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi, identifikasi terhadap kelompok sasaran menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang dapat tepat guna dan tepat sasaran. Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pelayanan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kecamatan.

Penetapan kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Cileunyi sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Selain itu, kelompok sasaran juga disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, karakteristik wilayah, serta kebutuhan riil masyarakat.

Berikut ini adalah kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung selama periode perencanaan tahun 2025–2029:

1. Masyarakat Umum

   Seluruh warga Kecamatan Cileunyi sebagai penerima layanan administratif dan pelayanan publik, seperti pelayanan kependudukan, surat menyurat, dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.

2. Perangkat Desa/Kelurahan

   Pemerintah desa/kelurahan yang dibina, difasilitasi, dan diawasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel di tingkat lokal.

3. Lembaga Kemasyarakatan

   Seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan RT/RW, yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.

4. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus

   Termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin

yang menjadi perhatian dalam aspek pelayanan dan perlindungan sosial.

5. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

   Yang difasilitasi dalam hal perizinan, pembinaan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

6. Pelajar dan Pemuda

   Yang menjadi target pembinaan karakter, pendidikan nonformal, dan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi oleh kecamatan.

7. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non-ASN Kecamatan

   Sebagai pelaksana teknis program yang memerlukan pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

### 2.1.5 Mitra Kecamatan Cileunyi dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cileunyi tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan, sinergi, dan koordinasi dengan berbagai mitra. Mitra pelayanan ini meliputi instansi pemerintah, lembaga swasta, serta unsur masyarakat yang berperan sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Adapun Mitra Kecamatan Cileunyi dalam pemberian pelayanan antara lain:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bandung

   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam pelayanan administrasi kependudukan;

   b. Dinas Sosial dalam pendampingan bantuan sosial dan pemberdayaan Masyarakat;

   c. Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya promotif-preventif;

   d. Dinas Pendidikan dalam mendukung layanan pendidikan di wilayah kecamatan.

2. Pemerintah Desa

Sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah,

desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pembangunan wilayah.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Ekonomi Lokal Berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan pelayanan berbasis kewirausahaan.
4. Lembaga Kemasyarakatan

   Seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, dan kelompok swadaya masyarakat yang berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik.
5. Aparat Keamanan

   Polsek dan Koramil Cileunyi, yang berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan

   Puskesmas, klinik, rumah sakit, serta sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Cileunyi yang menjadi mitra dalam peningkatan kualitas layanan dasar.
7. Pihak Swasta dan Dunia Usaha

   Dalam bentuk program CSR *(Corporate Social Responsibility)* maupun kemitraan lainnya yang dapat mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategris Kecamatan Cileunyi

### 2.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2025 – 2029

RPJMN 2025–2029 merupakan pedoman utama pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Cileunyi, dalam merumuskan rencana strategis pembangunan. Dokumen RPJMN ini menetapkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya

manusia, pengembangan infrastruktur, transformasi ekonomi yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan.

Beberapa prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dan menjadi fokus dalam Renstra Kecamatan Cileunyi antara lain:

1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan administrasi serta pembangunan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat.
3. Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM, yang bertujuan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor pertanian.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan publik, yang mendukung kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko bencana, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keamanan masyarakat.

### 2.2.2 Penelahaan Terhadap RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025–2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi. RPJMD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat

visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bandung selama periode 2025–2029.

RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, termasuk Kecamatan Cileunyi.

Beberapa prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung yang relevan dengan perencanaan di Kecamatan Cileunyi antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan efektif, guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten.
2. Pengembangan infrastruktur wilayah, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, sarana air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Cileunyi.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui program pendidikan, pelatihan, dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif sebagai basis ekonomi wilayah kecamatan.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

### 2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang dan tata guna lahan secara terintegrasi dan

berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk Kecamatan Cileunyi. Penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Bandung menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan selaras dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

RTRW Kabupaten Bandung mengatur zonasi wilayah berdasarkan fungsi dan peruntukannya, seperti zona pemukiman, zona pertanian, zona industri, zona konservasi, dan zona jasa. Penyesuaian program pembangunan di Kecamatan Cileunyi harus memperhatikan kebijakan pengelolaan ruang tersebut agar tidak terjadi konflik penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, RTRW Kabupaten Bandung juga memuat arahan pengembangan infrastruktur, kawasan permukiman, serta kawasan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten. Dengan mengacu pada RTRW, Kecamatan Cileunyi dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya.

Melalui penelaahan RTRW Kabupaten/Kota ini, Renstra Kecamatan Cileunyi diharapkan mampu mengintegrasikan aspek tata ruang dalam perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan di kecamatan dapat berlangsung secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

### 2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Cileunyi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen KLHS Kabupaten Bandung menyajikan analisis terhadap dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang dirancang

oleh pemerintah daerah, termasuk layanan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam konteks Kecamatan Cileunyi, analisis terhadap hasil KLHS sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah telah mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi kawasan hijau, serta mitigasi risiko bencana lingkungan.

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal strategis yang menjadi perhatian dan harus diintegrasikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cileunyi, antara lain:

1. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kecamatan, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian limbah domestik dan industri, serta pelestarian kawasan hijau.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
3. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pelayanan publik, agar kegiatan pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.
4. Pengelolaan risiko bencana berbasis lingkungan, sebagai upaya mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan kecamatan.

Dengan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi dari KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Cileunyi, diharapkan program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

### 2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cileunyi

Pelayanan publik di Kecamatan Cileunyi secara umum telah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan strategis ke depan. Permasalahan ini meliputi aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan utama dalam pelayanan Kecamatan Cileunyi antara lain:

Tabel 2.20

Pohon Potensi dan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

| No | Potensi Kecamatan | Permasalahan | Kondisi Eksisting | Lokasi (Desa/Kelurahan) | Akar Masalah | Saran Kegiatan | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mempunyai Wilayah Permukiman dan Tata Ruang yang cukup luas | Pertumbuhan kawasan permukiman yang pesat dan tidak terkendali, alih fungsi lahan pertanian | Pertumbuhan perumahan baru meningkat, lahan sawah menyusut | Desa Cileunyi Wetan, Cileunyi Kulon, Cibiru Hilir | Kurangnya pengendalian tata ruang dan lemahnya penegakan aturan alih fungsi lahan | Penegakan RTRW, perencanaan kawasan berbasis lingkungan, pembatasan alih fungsi lahan produktif | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR)<br>3.Dinas Pertanian (DISTAN)<br>4.Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman (DISPERKIM)<br>5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
| 2 | Wilayah Kecamatan Cileunyi sebagai Jalur Penghubung Transportasi dan Infrastruktur Jalan antara Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat | Kemacetan parah di simpul Cileunyi, akses jalan desa belum merata | Simpul Cileunyi menjadi bottleneck, jalan desa sebagian rusak/sempit | Desa Cileunyi Wetan, Desa Cimekar, Desa Cinunuk | Pertumbuhan kendaraan, belum adanya rekayasa lalu lintas terpadu, keterbatasan pelebaran jalan | Pembangunan jalan pendamping/ akses, pelebaran jalan desa, manajemen lalu lintas dan angkutan umum | 1.Dinas Perhubungan<br>2.Dinas PUPR<br>3.Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat |

| No | Potensi Kecamatan | Permasalahan | Kondisi Eksisting | Lokasi (Desa/Kelurahan) | Akar Masalah | Saran Kegiatan | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat | Belum Optimalnya Edukasi Pengembangan Usaha, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Minimnya Permodalan, dan Legalitas/Ijin Usaha dan Produk | Kelembagaan, Keragaman Usaha (Kuliner, Kerajinan Tangan, Fashion, Jasa, Sektor Pertanian/ Perternakan/ Perikanan | Seluruh Desa | Masih rendahnya literasi dan pengetahuan, Askes terhadap lembaga perijinan/legalitas produk/Haki serta Modal Usaha | Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi Manajemen Usaha (Perencanaan, Implementasi, Pemasaran, Inovasi, Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan/Administrasi Keuangan | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Koperasi & UMKM (DISKOPUKM)<br>3.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, (DISKOMINFO)<br>4.Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN)<br>5.Dinas Pertanian (DISTAN)<br>6.Dinas Pangan dan Perikanan (DISPAKAN) |
| 4 | Perdagangan dan Jasa | Ketimpangan fasilitas pasar tradisional dengan pertumbuhan pasar/retail modern | Pasar tradisional padat dan kurang tertata, mall modern berkembang | Seluruh Desa | Fasilitas pasar tradisional terbatas, belum terlaksananya revitalisasi pasar tradisional | Revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, kemitraan dengan retail modern | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN)<br>3.Dinas Koperasi & UMKM (DISKOPUKM)<br>4.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) |
| 5 | Kependudukan dan Pelayanan Dasar | Kepadatan penduduk, keterbatasan sarana pendidikan dan kesehatan | Sekolah negeri terbatas, fasilitas kesehatan Puskesmas padat pasien | Seluruh Desa | Pertumbuhan penduduk tinggi, urbanisasi, fasilitas dasar tidak sebanding, Rata -rata Angka | Penambahan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), peningkatan kapasitas puskesmas, | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Pendidikan (DISDIK)<br>3.Dinas Kesehatan (DINKES)<br>4.Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) |

| No | Potensi Kecamatan | Permasalahan | Kondisi Eksisting | Lokasi (Desa/Kelurahan) | Akar Masalah | Saran Kegiatan | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | putus sekolah cukup tinggi | layanan kesehatan keliling | |
| 6 | Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | Timbulan sampah tinggi, sistem pengelolaan sampah belum optimal | TPS banyak overload, bank sampah masih terbatas | Seluruh desa, terutama dekat pasar dan perumahan | Kesadaran warga rendah, minim fasilitas pengolahan, keterbatasan armada | Optimalisasi bank sampah, TPS 3R, edukasi pemilahan sampah rumah tangga | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Lingkungan Hidup (DLH)<br>3.Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman (DISPERKIM)<br>4.DLHK Provinsi Jabar |
| 7 | Sumber Daya Alam | Sering Terjadinya Kebencanaan Banjir dan Longsor pada beberapa titik lokasi | Titik rawan banjir di sekitar sungai dan perumahan | Seluruh Desa | Drainase buruk, alih fungsi lahan resapan, sampah di aliran sungai | Normalisasi sungai, pembangunan drainase terpadu, penghijauan daerah rawan longsor, Pembangunan Embung dan Kolam Retensi di Wilayah Hilir | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Badan Penangulan Bencana Daerah (BPBD)<br>3.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR)<br>4.Dinas Lingkungan Hidup (DLH)<br>5.BBWS Citarum (Pusat) |
| 8 | Sosial dan Budaya | Kemiskinan, pengangguran, potensi konflik sosial akibat kepadatan, Banyaknya Lingkung Seni | Tingkat pengangguran tinggi, Lingkung Seni Belum mendapatkan Legalitas | Seluruh Desa | Lapangan kerja terbatas, kepadatan penduduk, rendahnya keterampilan, Akses terhadap Pengurusan | Pelatihan kerja, pemberdayaan pemuda, peningkatan keamanan lingkungan, Fasilitasi dan Koordinasi | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Dinas Sosial (DINSOS)<br>3.Dinas KetenagaKerjaan (DISNAKER)<br>4.Dinas Kebudayaan (DISBUD)<br>5.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF) |

| No | Potensi Kecamatan | Permasalahan | Kondisi Eksisting | Lokasi (Desa/Kelurahan) | Akar Masalah | Saran Kegiatan | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Lingkung Seni berijin/legalitas | Legalitas Lingkung Seni | |
| 9 | Wilayah Kecamatan Cileunyi merupakan Lokasi yang strategis | Belum mempunyai Alun- alun dan Masjid Besar Cileunyi | Belum ada ruang terbuka publik representatif | Pusat Kecamatan (sekitar kantor kecamatan) | Kurangnya perencanaan fasilitas publik terpadu | Pembangunan alun-alun Cileunyi dan masjid besar sebagai pusat kegiatan masyarakat | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Badan Perencana, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)<br>3.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR)<br>4.Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman (DISPERKIM) |
| 10 | Ketentraman Umum dan Penegakan Perda | Masih banyaknya Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum | Tingkat Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum cukup tinggi/ rawan | Seluruh Desa | Belum Optimalnya Koordinasi Kewilayahan | Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Trantib Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | 1.Kecamatan Cileunyi (Fasilitasi dan Koordinasi)<br>2.Satpol PP<br>3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)<br>4.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR)<br>5.Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman (DISPERKIM)<br>6.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) |

Sumber Data : Hasil Analisis Potensi dan Permasalahan Kecamatan Cileunyi

1. Pertumbuhan permukiman pesat & alih fungsi lahan pertanian

   Kondisi Geografis Kecamatan Cileunyi yang strategis menjadikan konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di wilayah Cileunyi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana hal tersebut mengurangi lahan resapan dan mengubah pola tata guna lahan, yang dapat berdampak pada berkurangnya produksi pangan lokal, peningkatan risiko banjir (kurang resapan), tekanan pada infrastruktur dasar, naiknya harga tanah dan potensi konflik lahan.

2. Kemacetan parah di simpul Cileunyi & akses jalan desa belum merata

   Wilayah Kecamatan Cileunyi menjadi penghubung antara beberapa Kabupaten/ Kota Jawa Barat, tetapi askes jalan pada simpul cileunyi belum dapat mengurangi kemacetan seperti pada simpang/gerbang tol Cileunyi dan jalur arteri kerap mengalami kepadatan pada waktu tertentu terutama saat hari raya/libur nasional, sementara akses jalan desa masih belum merata menjadi hambatan mobilitas lokal.

3. Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat

   Tingkat/Sebaran/Jumlah Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat pada tiap desa belum diimbangi dengan Edukasi/ Pendanpingan Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana, Permodalan, Legalitas yang dapat menurunkan potensi perekonomian serta kurang dapat memperkenalkan berbagai potensi lokal yang menjadikan ciri khas cileunyi.

4. Ketimpangan fasilitas pasar tradisional dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan modern

   Fenomena revitalisasi pasar tradisional salah satunya Pasar Sehat Cileunyi namun resistensi pedagang terhadap relokasi dan kesenjangan fasilitas masih terjadi, yang dapat berdampak berkurangnya daya tarik pasar tradisional, eksodus pedagang, dan ketidakseimbangan ekonomi lokal.

5. Kepadatan penduduk, keterbatasan sarana pendidikan & kesehatan

   Pertumbuhan permukiman mendorong kepadatan yang berdampak meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan dasar dan layanan kesehatan primer seringkali kurang memadai atau beroperasi di bawah kapasitas—masalah umum di wilayah.

6. Timbulan sampah tinggi; sistem pengelolaan belum optimal

   Berdasarkan jumlah penduduk yang tinggi di Kecamatan Cileunyi, dan jumlah perkantoran/toko/usaha lainya yang dapat menghasilkan sampah rumah organik dan anorganik, tetapi belum meratanya titik lokasi pembuangan sampah yang dapat menjadikan timbulan sampah yang cukup tinggi, yang meningkatkan timbulan sampah yang tinggi baik dihasilkan oleh rumah warga ataupun perkantoran/toko,sedangkan untuk beberapa titik lokasi pembuangan sampah belum merata yang menjadikan timbulan sampah yang cukup tinggi. Meskipun ada beberapa inovasi/ inisiatif pengelolaan sampah yang sudah berjalan dibeberapa RW/desa (contoh pengolahan organik, maggot), namun skala dan koordinasi antar desa masih perlu ditingkatkan.

7. Sering terjadinya kebencanaan banjir dan longsor pada beberapa titik lokasi

   Kondisi Geografis Kecamatan Cileunyi yang cukup strategis terdiri dari bukit dan bendungan yang menjadikan sebagai potensi objek wisata/ pariwisata alam, tetapi berdasarkan kondisi penduduk yang heterogen menyebabkan belum merata kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar baik daerah bukit/ bendungan pada beberapa desa, dimana hal tersebut dapat meningkatkan kebencanaan alam pada beberapa titik lokasi.

8. Kemiskinan, pengangguran, potensi konflik sosial akibat kepadatan

   Proses urbanisasi yang cepat dapat meningkatkan pengangguran struktural dan tekanan ekonomi bagi penduduk berpendapatan rendah, ketimpangan fasilitas dan daya beli memicu gesekan sosial bila peluang ekonomi tidak merata, yang dapat meningkatnya kerentanan sosial, kriminalitas kecil, dan potensi konflik sosial.

9. Belum mempunyai Alun- alun dan Masjid Besar Cileunyi
   Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai tingkat penduduk yang tinggi serta lokasi strategis, wilayah kecamatan cileunyi belum mempunyai Alun- Alun dan Masjid Besar Cileunyi, untuk fasilitasi berbagai kegiatan yang menjadi kewenangan perangkat daerah kewilayahan.

10. Ketentraman dan Ketertiban Umum

    Sebagai wilayah urbanisasi kecamatan cileunyi cenderung memiliki potensi rawannya pelanggaran perda dan ketertiban umum, yang disebabkan belum optimalnya koordinasi kewilayahan serta belum adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi pelayanan Kecamatan CIleunyi untuk periode 2025–2029. Upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi arah kebijakan yang akan diutamakan dalam periode mendatang.

### 2.2.6 Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2029. Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan, evaluasi kinerja sebelumnya, serta hasil analisis kondisi internal dan eksternal kecamatan.

Isu strategis yang ditetapkan mencerminkan tantangan utama yang harus dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Cileunyi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Proses identifikasi isu strategis mempertimbangkan aspek:

1. Tugas dan fungsi kecamatan sesuai kewenangannya sebagai perangkat daerah,
2. Hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja pada periode sebelumnya,
3. Isu-isu pembangunan nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD, RTRW, KLHS),
4. Masukan dari pemangku kepentingan,
5. Serta potensi dan permasalahan aktual yang berkembang di wilayah Kecamatan Cileunyi.

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi tersebut disajikan pada Tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2.21
Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Cileunyi

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Mempunyai Wilayah Permukiman dan Tata Ruang yang cukup luas | Pertumbuhan kawasan permukiman yang pesat dan tidak terkendali, alih fungsi lahan pertanian | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan |
| Wilayah Kecamatan Cileunyi sebagai Jalur Penghubung Transportasi dan Infrastruktur Jalan antara Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat | Kemacetan parah di simpul Cileunyi, akses jalan desa belum merata | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Mempunyai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak | Keterbatasan akses pemasaran dan digitalisasi UMKM | Pengelolaan potensi wisata dan budaya | Tren ekowisata dan konservasi budaya | Pengembangan pariwisata berkelanjutan | Pelestarian budaya lokal dan lingkungan | Pengembangan wisata berkelanjutan dan pelestarian budaya |
| Perdagangan dan Jasa | Ketimpangan fasilitas pasar tradisional dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan modern | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan |
| Kependudukan dan Pelayanan Dasar | Kepadatan penduduk, keterbatasan sarana pendidikan dan kesehatan | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | Timbulan sampah tinggi, sistem pengelolaan sampah belum optimal | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peningkatan infrastruktur ramah lingkungan |
| Sumber Daya Alam | Sering Terjadinya Kebencanaan Banjir dan Longsor pada beberapa titik lokasi | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan |
| Sosial dan Budaya | Kemiskinan, pengangguran, potensi konflik sosial akibat kepadatan | Kualitas lingkungan sosial dan daya dukung pemukiman | Konflik sosial, perubahan pola hidup | Program pengentasan kemiskinan, pembangunan inklusif, penguatan stabilitas sosial | Penataan kawasan, penyediaan ruang publik dan sarana sosial yang merata | Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan , pencegahan konflik sosial, penguatan kelembagaan |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| | | | | | | sosial masyarakat |
| Wilayah Kecamatan Cileunyi merupakan Lokasi yang strategis | Belum mempunyai Alun-alun dan Masjid Besar Cileunyi | Tata ruang dan pengembangan infrastruktur | Urbanisasi dan mobilitas | Pembangunan infrastruktur berkelanjutan | Pengelolaan infrastruktur dan ruang terbuka | Peningkatan infrastruktur wilayah |
| Ketentraman Umum dan Penegakan Perda | Masih banyaknya Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum | Tata kelola lingkungan perkotaan dan permukiman | Urbanisasi dan mobilitas | Penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan ketertiban sosial | Penanganan sampah perkotaan dan pelanggaran pemanfaatan lahan | Kolaborasi dengan masyarakat melalui edukasi kesadaran hukum & ketertiban |

Sumber Data : Hasil Analisis Potensi dan Permasalahan Kecamatan Cileunyi

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan visi pembangunan daerah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”

Visi tersebut merupakan cerminan dari arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung dalam menghadapi tantangan dan peluang menuju kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima (5) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah
   Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam berbagai sektor untuk mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
2. Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata
   Memastikan akses yang setara dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kreativitas dalam Bingkai Kearifan Lokal
   Mengajak masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan inovasi.

4. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, serta Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan

   Mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan profesional, serta memperkuat karakter religius masyarakat.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Lemah Menjamin keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan dan perhatian khusus bagi kelompok rentan dan miskin.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cileunyi disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung, dan berpedoman pada visi dan misi Bupati.

Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan Cileunyi, potensi wilayah, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan selama periode 2025–2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cileunyi, yaitu:

### 3.1.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Cileunyi untuk mencapai Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### 3.1.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Kecamatan Cileunyi, yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamat

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 – 2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat | 0,20% | 0,21% | 0,24% | 0,36% | 0,40% | 0,51% | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya. |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 86,50 | 86,68 | 86,89 | 87,2 | 87,55 | 88,00 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017 |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi 2025

## 3.2 Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra, Kecamatan Cileunyi merancang penahapan pembangunan secara sistematis setiap tahunnya selama periode 2026 hingga 2030. Penahapan ini disusun sebagai langkah operasional dan evaluatif guna memastikan ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Tahap I (2026) difokuskan pada penataan permasalahan dan potensi pada tiap desa. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasikan ketimpangan antar desa baik dari akses Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Sarana dan Prasarana Umum, Menyusun data kebijakan strategis berbasis kebutuhan masyarakat

Tahap II (2027) diarahkan pada pelaksanaan implementasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kebutuhan Masyarakat dalam mengurangi ketimpangan antar desa dari askes Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Sarana dan Prasarana Umum

Tahap III (2028) merupakan tahap inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis potensi lokal. Selain itu, dilakukan penataan ulang ruang layanan publik agar lebih inklusif, serta pelaksanaan berbagai program pelayanan berbasis inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Tahap IV (2029) difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pada tahap ini, sistem layanan publik akan diintegrasikan dengan aplikasi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan data. Kecamatan juga akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik sebagai bagian dari mekanisme umpan balik dan akuntabilitas dalam rangka Sinkronisasi pembangunan daerah dan desa berbasis potensi lokal

Tahap V (2030) merupakan tahap evaluasi dan penguatan keberlanjutan. Seluruh program dan kebijakan akan dievaluasi secara menyeluruh untuk mengukur capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan strategi. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyesuaian arah kebijakan

dan penguatan layanan publik dan pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Tabel 3.2

Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 – 2029

| Tahap I (2026) | Tahap II (2027) | Tahap III (2028) | Tahap IV (2029) | Tahap V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Peningkatan kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal | Peningkatan kegiatan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal | Peningkatan kegiatan pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor | Penguatan kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor | Penguatan kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi, 2025

3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025 – 2026.

Berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 dan operasionalisasi NSPK, Kecamatan Cileunyi menyusun arah kebijakan Renstra yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan peningkatan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 - 2029

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan | Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital | |

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien | masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal | berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan | |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi, 2025

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Cileunyi, penyelenggaraan pembangunan dilakukan melalui perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan terukur. Setiap bidang urusan memiliki program prioritas yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan daerah.

Penetapan program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian hasil pembangunan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi acuan evaluasi dan monitoring untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cileunyi dapat berjalan secara optimal, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi daerah. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 – 2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat | | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017 |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah | | 1.Nilai Indeks Reformasi Birokrasi<br>2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br>2. Hasil Manuritas Manajemen Resiko Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan dan laporan capaian kinerja yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. | Nilai AKIP | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
| | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| | | | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x100% |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah yang lengkap dan sesuai prosedur | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah administrasi BMD yang terkelola dengan baik/Jumlah adaministrasi BMD x 100% |
| | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang lengkap dan tepat waktu | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan/ Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian PD yang diselesaikan x 100% |
| | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| | | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum yang lengkap dan valid | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x100% |
| | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang lengkap dan sesuai prosedur | Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi/Jumlah dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah yang harus dipenuhi x 100% |
| | | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun berkala | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x100% |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah yang terpelihara dan terawat | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik/Jumlah Aset Barang Milik Daerah x100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| | | | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan | | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang ditargetkan x 100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tangan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan/jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100% |
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| | | | | Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat secara tepat waktu dan sesuai prosedur | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| | | | Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat | | | | |
| | | | | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai dengan target yang ditetapkan | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100% |
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan target yang ditetapkan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100% |
| | | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan sesuai dengan target yang ditetapkan | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |
| | | | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib | | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban sesuai target yang ditetapkan | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai target yang ditetapkan | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Negara Republik Indonesia | Negara Republik Indonesia | Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan | | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional |
| | | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| | | | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan | | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku | Persentase desa yang dibina dan diawasi | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |

Sumber Data : Hasil Pemutakhiran Data Renstra SIPD Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029

# Tabel 4.2

## Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | |
| | | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| KECAMATAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | - | Poin | 5.148.194.735,00 | 61,00 | Poin | 5.280.481.224,00 | 63,50 | Poin | 5.258.223.736,00 | 66,00 | Poin | 5.258.223.736,00 | 68,50 | Poin | 5.258.223.736,00 | 71.00 | Poin | 5.258.223.736,00 | S 3.1 |
| | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah | 42,26 | Poin | | 43,00 | Poin | | 44,00 | Poin | | 46,00 | Poin | | 47,00 | Poin | | 48,00 | Poin | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 74,50 | Poin | 20.827.000,00 | 80,00 | Poin | 22.827.000,00 | 80,15 | Poin | 22.827.000,00 | 80,30 | Poin | 22.827.000,00 | 80,50 | Poin | 22.827.000,00 | 80,60 | Poin | 22.827.000,00 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 3.252.000,00 | 2 | Dokumen | 3.252.000,00 | 2 | Dokumen | 3.252.000,00 | 2 | Dokumen | 3.252.000,00 | 2 | Dokumen | 3.252.000,00 | 3 | Dokumen | 3.252.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | 2 | Dokumen | 4.250.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | 2 | Dokumen | 3.325.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | 2 | Dokumen | 3.750.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | 2 | Dokumen | 3.250.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | 2 | Laporan | 3.000.000,00 | |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 0 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1.000.000,00 | 1 | Dokumen | 1.000.000,00 | 1 | Dokumen | 1.000.000,00 | 1 | Dokumen | 1.000.000,00 | 1 | Dokumen | 1.000.000,00 | |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 0 | Data | - | 15 | Data | 1.000.000,00 | 15 | Data | 1.000.000,00 | 15 | Data | 1.000.000,00 | 15 | Data | 1.000.000,00 | 15 | Data | 1.000.000,00 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 | % | 4.432.188.418,00 | 100 | % | 4.674.519.000,00 | 100 | % | 4.674.519.000,00 | 100 | % | 4.674.519.000,00 | 100 | % | 4.674.519.000,00 | 100 | % | 4.674.519.000,00 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 | Orang/bulan | 4.422.618.418,00 | 24 | Orang/bulan | 4.664.949.000,00 | 24 | Orang/bulan | 4.664.949.000,00 | 24 | Orang/bulan | 4.664.949.000,00 | 24 | Orang/bulan | 4.664.949.000,00 | 24 | Orang/bulan | 4.664.949.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | 4 | Laporan | 3.345.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | 8 | Laporan | 4.225.000,00 | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | 1 | Dokumen | 2.000.000,00 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | 100 | % | 18.175.780,00 | 100 | % | 34.834.000,00 | 100 | % | 45.634.000,00 | 100 | % | 45.634.000,00 | 100 | % | 45.634.000,00 | 100 | % | 45.634.000,00 | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | 4 | Dokumen | 2.804.000,00 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | |
| | | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| KECAMATAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | Paket | - | 0 | Paket | | 1 | Paket | 10.800.000,00 | 1 | Paket | 10.800.000,00 | 1 | Paket | 10.800.000,00 | 1 | Paket | 10.800.000,00 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 | Orang | 15.371.780,00 | 40 | Orang | 32.030.000,00 | 40 | Orang | 32.030.000,00 | 40 | Orang | 32.030.000,00 | 40 | Orang | 32.030.000,00 | 40 | Orang | 32.030.000,00 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD | 100 | % | 3.525.000,00 | 100 | % | 2.750.000,00 | 100 | % | 2.750.000,00 | 100 | % | 2.750.000,00 | 100 | % | 2.750.000,00 | 100 | % | 2.750.000,00 | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Laporan | 3.525.000,00 | 4 | Laporan | 2.750.000,00 | 4 | Dokumen | 2.750.000,00 | 4 | Dokumen | 2.750.000,00 | 4 | Dokumen | 2.750.000,00 | 4 | Dokumen | 2.750.000,00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 163.863.937,00 | 100 | % | 164.174.100,00 | 100 | % | 164.174.100,00 | 100 | % | 164.174.100,00 | 100 | % | 164.174.100,00 | 100 | % | 164.174.100,00 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 3.000.000,00 | 2 | Paket | 5.000.000,00 | 2 | Paket | 5.000.000,00 | 2 | Paket | 5.000.000,00 | 2 | Paket | 5.000.000,00 | 2 | Paket | 5.000.000,00 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 75.095.000,00 | 12 | Paket | 63.247.250,00 | 12 | Paket | 63.247.250,00 | 12 | Paket | 63.247.250,00 | 12 | Paket | 63.247.250,00 | 12 | Paket | 63.247.250,00 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | Paket | 7.223.000,00 | 2 | Paket | 13.586.850,00 | 2 | Paket | 13.586.850,00 | 2 | Paket | 13.586.850,00 | 2 | Paket | 13.586.850,00 | 2 | Paket | 13.586.850,00 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 | Paket | 20.250.963,00 | 8 | Paket | 18.600.000,00 | 8 | Paket | 18.600.000,00 | 8 | Paket | 18.600.000,00 | 8 | Paket | 18.600.000,00 | 8 | Paket | 18.600.000,00 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | 12 | Dokumen | 6.240.000,00 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 52.054.974,00 | 4 | Laporan | 57.500.000,00 | 4 | Laporan | 57.500.000,00 | 4 | Laporan | 57.500.000,00 | 4 | Laporan | 57.500.000,00 | 4 | Laporan | 57.500.000,00 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 15.000.000,00 | 100 | % | 35.358.288,00 | 100 | % | 43.622.800,00 | 100 | % | 43.622.800,00 | 100 | % | 43.622.800,00 | 100 | % | 43.622.800,00 | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 | Unit | 15.000.000,00 | 22 | Unit | 35.358.288,00 | 5 | Unit | 43.622.800,00 | 5 | Unit | 43.622.800,00 | 5 | Unit | 43.622.800,00 | 5 | Unit | 43.622.800,00 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 298.580.600,00 | 100 | % | 250.995.836,00 | 100 | % | 228.795.836,00 | 100 | % | 228.795.836,00 | 100 | % | 228.795.836,00 | 100 | % | 228.795.836,00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 46.500.000,00 | 12 | Laporan | 25.566.836,00 | 12 | Laporan | 25.566.836,00 | 12 | Laporan | 25.566.836,00 | 12 | Laporan | 25.566.836,00 | 12 | Laporan | 25.566.836,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 252.080.600,00 | 12 | Laporan | 225.429.000,00 | 12 | Laporan | 203.229.000,00 | 12 | Laporan | 203.229.000,00 | 12 | Laporan | 203.229.000,00 | 12 | Laporan | 203.229.000,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 87 | % | 196.034.000,00 | 85,00 | % | 95.023.000,00 | 85,50 | % | 75.901.000,00 | 86,00 | % | 75.901.000,00 | 86,50 | % | 75.901.000,00 | 87,00 | % | 75.901.000,00 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 | Unit | 41.614.000,00 | 7 | Unit | 43.881.000,00 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 | 0 | - | | | | 9 | Unit | 40.131.000,00 | 9 | Unit | 40.131.000,00 | 9 | Unit | 40.131.000,00 | 9 | Unit | 40.131.000,00 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 | Unit | 3.675.000,00 | 4 | Unit | 10.000.000,00 | 4 | Unit | 10.000.000,00 | 4 | Unit | 10.000.000,00 | 4 | Unit | 10.000.000,00 | 4 | Unit | 10.000.000,00 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 150.745.000,00 | 1 | Unit | 41.142.000,00 | 1 | Unit | 25.770.000,00 | 1 | Unit | 25.770.000,00 | 1 | Unit | 25.770.000,00 | 1 | Unit | 25.770.000,00 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | |
| | | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| KECAMATAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | 100 | % | 374.342.600,00 | 100 | % | 194.124.200,00 | 100 | % | 296.997.764,00 | 100 | % | 436.884.964,00 | 100 | % | 504.144.414,00 | 100 | % | 765.004.294,00 | S 3.1 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain | 100 | % | 4.214.000,00 | 100 | % | 4.214.000,00 | 100 | % | 4.214.000,00 | 100 | % | 4.214.000,00 | 100 | % | 4.214.000,00 | 100 | % | 4.214.000,00 | |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | 1 | Laporan | 4.214.000,00 | |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100 | % | 16.572.000,00 | 100 | % | 22.244.000,00 | 100 | % | 10.974.000,00 | 100 | % | 10.974.000,00 | 100 | % | 10.974.000,00 | 100 | % | 10.974.000,00 | |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 | Laporan | 16.572.000,00 | 4 | Laporan | 22.244.000,00 | 4 | Laporan | 10.974.000,00 | 4 | Laporan | 10.974.000,00 | 4 | Laporan | 10.974.000,00 | 4 | Laporan | 10.974.000,00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 | % | 353.556.600,00 | 100 | % | 167.666.200,00 | 100 | % | 281.809.764,00 | 100 | % | 421.696.964,00 | 100 | % | 488.956.414,00 | 100 | % | 749.816.294,00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 | Laporan | 353.556.600,00 | 4 | Laporan | 167.666.200,00 | 4 | Laporan | 281.809.764,00 | 4 | Laporan | 421.696.964,00 | 4 | Laporan | 488.956.414,00 | 4 | Laporan | 749.816.294,00 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | 100 | % | 184.741.000,00 | 100 | % | 181.077.171,00 | 100 | % | 50.480.000,00 | 100 | % | 50.480.000,00 | 100 | % | 50.480.000,00 | 100 | % | 50.480.000,00 | S 3.1 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | % | 81.672.000,00 | 100 | % | 67.463.299,00 | 100 | % | 10.000.000,00 | 100 | % | 10.000.000,00 | 100 | % | 10.000.000,00 | 100 | % | 10.000.000,00 | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 | Laporan | 81.672.000,00 | 1 | Laporan | 67.463.299,00 | 1 | Laporan | 10.000.000,00 | 1 | Laporan | 10.000.000,00 | 1 | Laporan | 10.000.000,00 | 1 | Laporan | 10.000.000,00 | |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina | 100 | % | 103.069.000,00 | 100 | % | 92.632.912,00 | 100 | % | 35.437.000,00 | 100 | % | 35.437.000,00 | 100 | % | 35.437.000,00 | 100 | % | 35.437.000,00 | |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.183.000,00 | 2 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.984.400,00 | 2 | Lembaga Kemasyarakatan | 25.857.000,00 | 2 | Lembaga Kemasyarakatan | 25.857.000,00 | 2 | Lembaga Kemasyarakatan | 25.857.000,00 | 2 | Lembaga Kemasyarakatan | 25.857.000,00 | |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 | Laporan | 14.343.000,00 | 1 | Laporan | 17.584.900,00 | 1 | Laporan | 7.580.000,00 | 1 | Laporan | 7.580.000,00 | 1 | Laporan | 7.580.000,00 | 1 | Laporan | 7.580.000,00 | |
| Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 | Laporan | 9.543.000,00 | 1 | Laporan | 11.063.612,00 | 1 | Laporan | 2.000.000,00 | 1 | Laporan | 2.000.000,00 | 1 | Laporan | 2.000.000,00 | 1 | Laporan | 2.000.000,00 | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 0 | % | - | 100 | % | 20.980.960,00 | 100 | % | 5.043.000,00 | 100 | % | 5.043.000,00 | 100 | % | 5.043.000,00 | 100 | % | 5.043.000,00 | |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 | Keluarga | - | 50 | Keluarga | 10.386.060,00 | 50 | Keluarga | 900.000,00 | 50 | Keluarga | 900.000,00 | 50 | Keluarga | 900.000,00 | 50 | Keluarga | 900.000,00 | |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 0 | Keluarga | - | 50 | Keluarga | 10.594.900,00 | 50 | Keluarga | 4.143.000,00 | 50 | Keluarga | 4.143.000,00 | 50 | Keluarga | 4.143.000,00 | 50 | Keluarga | 4.143.000,00 | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 107.388.000,00 | 100 | % | 52.187.000,00 | 100 | % | 30.857.300,00 | 100 | % | 30.857.300,00 | 100 | % | 30.857.300,00 | 100 | % | 30.857.300,00 | S 3.1 |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | |
| | | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| KECAMATAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | % | 64.569.000,00 | 100 | % | 39.425.000,00 | 100 | % | 18.095.300,00 | 100 | % | 18.095.300,00 | 100 | % | 18.095.300,00 | 100 | % | 18.095.300,00 | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | Laporan | 52.329.000,00 | 1 | Laporan | 34.025.000,00 | 1 | Laporan | 15.395.300,00 | 1 | Laporan | 15.395.300,00 | 1 | Laporan | 15.395.300,00 | 1 | Laporan | 15.395.300,00 | |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 | Laporan | 12.240.000,00 | 1 | Laporan | 5.400.000,00 | 1 | Laporan | 2.700.000,00 | 1 | Laporan | 2.700.000,00 | 1 | Laporan | 2.700.000,00 | 1 | Laporan | 2.700.000,00 | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 | % | 42.819.000,00 | 100 | % | 12.762.000,00 | 100 | % | 12.762.000,00 | 100 | % | 12.762.000,00 | 100 | % | 12.762.000,00 | 100 | % | 12.762.000,00 | |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | Laporan | 42.819.000,00 | 1 | Laporan | 12.762.000,00 | 1 | Laporan | 12.762.000,00 | 1 | Laporan | 12.762.000,00 | 1 | Laporan | 12.762.000,00 | 1 | Laporan | 12.762.000,00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100 | % | 105.739.620,00 | 100 | % | 171.314.900,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | S 3.1 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | % | 105.739.620,00 | 100 | % | 171.314.900,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | 100 | % | 38.000.000,00 | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 50 | Orang | 42.550.000,00 | 100 | Orang | 110.414.900,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 50 | Orang | 29.150.000,00 | 100 | Orang | 42.900.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | 50 | Orang | 10.000.000,00 | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 | Dokumen | 34.039.620,00 | 1 | Laporan | 18.000.000,00 | 1 | Laporan | 18.000.000,00 | 1 | Laporan | 18.000.000,00 | 1 | Laporan | 18.000.000,00 | 1 | Laporan | 18.000.000,00 | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | 100 | % | 83.014.600,00 | 100 | % | 81.796.012,00 | 100 | % | 54.970.000,00 | 100 | % | 49.970.000,00 | 100 | % | 50.970.000,00 | 100 | % | 49.970.000,00 | S 3.1 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 | % | 83.014.600,00 | 100 | % | 81.796.012,00 | 100 | % | 54.970.000,00 | 100 | % | 49.970.000,00 | 100 | % | 50.970.000,00 | 100 | % | 49.970.000,00 | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 | Dokumen | 6.995.000,00 | 1 | Dokumen | 9.068.600,00 | 1 | Dokumen | 3.843.000,00 | 1 | Dokumen | 4.843.000,00 | 1 | Dokumen | 4.343.000,00 | 1 | Dokumen | 4.843.000,00 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 | Dokumen | 40.525.000,00 | 1 | Dokumen | 31.059.800,00 | 1 | Dokumen | 12.677.000,00 | 1 | Dokumen | 12.677.000,00 | 1 | Dokumen | 12.677.000,00 | 1 | Dokumen | 12.677.000,00 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 | Dokumen | - | 0 | Dokumen | | 5 | Dokumen | 6.000.000,00 | 0 | Dokumen | | 1 | Dokumen | 1.500.000,00 | 0 | Dokumen | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | | | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | |
| | | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | TARGET | | PAGU | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| KECAMATAN | | | | 6.003.420.555,00 | | | 5.960.980.507,00 | | | 5.729.528.800,00 | | | 5.864.416.000,00 | | | 5.932.675.450,00 | | | 6.192.535.330,00 | |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 | Dokumen | 35.494.600,00 | 2 | Dokumen | 41.667.612,00 | 2 | Dokumen | 32.450.000,00 | 2 | Dokumen | 32.450.000,00 | 2 | Dokumen | 32.450.000,00 | 2 | Dokumen | 32.450.000,00 | |

Sumber Data : Hasil Pemutakhiran Data Renstra SIPD Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029

Ket : S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

## 4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Cileunyi menyiapkan berbagai sub kegiatan strategis yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan maupun desa. Sub kegiatan tersebut dirancang agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjawab permasalahan aktual di wilayah Cileunyi, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kemacetan lalu lintas di simpul perkotaan, keterbatasan sarana prasarana pelayanan dasar, serta peningkatan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Adapun daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas | Outcome | Sub Kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| 3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan | Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi, 2025

## 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah disusun dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan indikator kinerja, capaian kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat diketahui, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatan kinerja pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja Kecamatan Cileunyi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Cileunyi dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 – 2029

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen (%) | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,40 | 0,51 | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya. |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi, 2025

## 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 melalui IKK

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya instrumen pengukuran kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun sebagai tolok ukur utama yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. IKK tidak hanya berfungsi untuk menilai capaian kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif, tetapi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cileunyi.

Melalui IKK, capaian pembangunan diharapkan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan, sehingga setiap upaya yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas wilayah.

Adapun target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci, sebagai pedoman dalam mengukur dan mengarahkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Table 4.5

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Cileunyi

Tahun 2025 – 2029

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen (%) | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,40 | 0,51 | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya. |

Sumber Data : Hasil Analisis Kecamatan Cileunyi, 2025

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Cileunyi.

Renstra Kecamatan Cileunyi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cileunyi setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cileunyi mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dokumen ini juga diharapkan menjadikan Kecamatan Cileunyi sebagai simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum diskusi dan konsultasi guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan Cileunyi.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2030 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Cileunyi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2030 telah dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030.
2. Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2030 wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cileunyi (Renja Kecamatan Cileunyi) setiap tahunnya, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renstra Kecamatan Cileunyi harus dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPA) Kecamatan Cileunyi.
4. Apabila terdapat kebijakan penganggaran bagi Kecamatan Cileunyi yang tidak sesuai atau belum tercantum dalam Renstra ini, maka akan dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Cileunyi Tahun 2025–2030, sebagaimana tercermin dalam dokumen Renja-PD Kecamatan Cileunyi, wajib dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Di tingkat Kecamatan Cileunyi, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh Kecamatan Cileunyi serta masukan dari para pemangku kepentingan, yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahun.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Kecamatan Cileunyi dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, aparatur Kecamatan Cileunyi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dituntut untuk memiliki karakter dan sikap yang tangguh, adaptif, inovatif, dan kreatif. Ini menjadi komitmen bersama bahwa dokumen Rencana Strategis ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Soreang,  September 2025

CAMAT CILEUNYI

Ttd

CUCU ENDANG

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mapping Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ..... 12

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung..... 20

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Cileunyi ..... 36

Gambar 2.3 Capaian IKU – IKK (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2022-2024 ..... 43

Gambar 2.4 Capaian IKU-IKK (Persentase Desa Beradmistrasi Baik dan Jumlah Desa Cepat Berkembang ..... 45

Gambar 2.5 Capaian IKU – IKK (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022-2024 ..... 47

Gambar 2.6 Capaian IKU – IKK (Persentase BMD dalam Kondisi Baik Tahun 2022-2024 ..... 49

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Sasaran Kinerja Pegawai pada Kecamatan Cileunyi ..... 22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 ..... 28
Tabel 2.3 Pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025 ..... 30
Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2025 ..... 30
Tabel 2.5 Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Cileunyi ..... 31
Tabel 2.6 Daftar Asset Kecamatan Cileunyi Tahun 2024..... 32
Tabel 2.7 Luas Wilayah Kecamatan Cileunyi ..... 36
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Cileunyi..... 36
Tabel 2.9 Jumlah Objek Wisata dan Usaha ..... 37
Tabel 2.10 Jumlah UMKM..... 38
Tabel 2.11 Jumlah Sekolah/ Lembaga Pendidikan Lainnya ..... 39
Tabel 2.12 Jumlah Pelayanan Kesehatan ..... 40
Tabel 2.13 Jumlah Perumahan ..... 41
Tabel 2.14 Capaian IKU – IKK (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2022-2024 ..... 43
Tabel 2.15 Capaian IKU-IKK (Persentase Desa Beradministrasi Baik dan Jumlah Desa Cepat Berkembang) Tahun 2022-2024..... 44
Tabel 2.16 Capaian IKU – IKK (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022-2024 ..... 47

Tabel 2.17 Capaian IKU – IKK (Persentase BMD dalam Kondisi Baik) Tahun 2022-2024 ..... 48

Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ... 51

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cileunyi ..... 67

Tabel 2.20 Pohon Potensi dan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ..... 91

Tabel 2.21 Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Cileunyi ..... 99

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 ..... 105

Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029..... 107

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cileunyi Tahun 2025 – 2029.. 107

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 ..... 124

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cileunyi ..... 139

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah..... 145

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 ..... 146

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Cileunyi Tahun 2025-2029 ..... 147